

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH
YANG TIDAK SAH**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :
KHUMAIROH BILKIS
122111019

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004
Jl. Candi Permata II/180 Semarang

Brilliyana Erna Wati, SH., MH.
NIP. 19631219 199903 2 001
Pakelsari Rt 01 Rw VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
An. Sdr. Khumairoh Bilkis	UIN Walisongo Semarang
	di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Khumairoh Bilkis
NIM : 122111019
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004



Semarang, 16 Mei 2016

Pembimbing II,

Brilliyana Erna Wati, SH., MH.
NIP. 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185*

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Khumairoh Bilkis
NIM : 122111019
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/ Prodi : Ahwal al-Syakshsiyyah
Judul skripsi : **"ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR
21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH"**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

14 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Tahun
Akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 19701208 199603 1 002

Brillivan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I

Penguji II

Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Nur Hidayati Setvani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Slamet Hambali, MSI.
NIP. 19540805 198003 1 004

Brillivan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا

أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat"

PERSEMBAHAN

Karya tangan ini akan aku persembahkan hanya untuk:

- Orang tuaku yang selalu menyupport aku, kasih sayang dan do'a yang tulus dan tak pernah putus, nasihat yang tak hentinya diucapkan, juga isi kantong yang tak ternilai dan tak berharga baginya namun bagiku tak bisa aku balas. Ayah tercinta Ahmad Zubaedi yang selalu menjadi motivasi kehidupan penulis, kebijaksanaan dan kesabaran yang selalu membimbing penulis menjadi orang yang bersyukur. Ibu tercinta Bachreyati perjuangan dan do'a yang selalu diberikan kepada anak-anaknya, meski ada amarah selalu menjadi tanda kasih sayangnya kepada penulis.
- Adik-adikku tersayang Jibril Baehaqi, Hamami Aulia Khatami dan Hazzena, meski ada pertengkaran kecil, tapi selalu mudah dihapus dengan canda tawa. Semua itu biarlah akan menjadi lukisan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Kalian bertiga mengingatkanku akan tanggung jawab sebagai kakak.
- Husni Fauzan sang pujaan dan pengobat hati, yang selalu menemani penulis sepanjang penyusunan skripsi. Ketidaktahuanku menjadi sirna dengan kehadiran dirimu. Kesabaran dan kesetiaan yang selama ini diberikan menghapus semua kesedihan diriku.
- Teman-teman AS A angkatan tahun 2012 rasa suka dan duka, canda dan tawa selama masa kuliah menjadikan pertemanan yang utuh dan solidaritas yang kuat, semoga kita bisa sukses bersama.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Mei 2016

Deklarator,



Khumairoh Bilkis

NIM. 122111019

ABSTRAK

Selain perceraian, di antara putusnya suatu perkawinan salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan pembatalan nikah. Perkawinan yang putus karena pembatalan, diajukan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan/ atau rukun untuk melangsungkan perkawinan. Putusnya perkawinan karena pembatalan, diajukan kepada pihak yang berwenang yaitu di Pengadilan. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat diminta pembatalannya dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 26 dan diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan dapat diajukannya pembatalan perkawinan.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut penulis berangkat untuk meneliti putusan Nomor: 21/PK/Ag/2013. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu: Bagaimana analisis terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013 ? Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 21/PK/Ag/2013?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer berupa Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013 dan sumber data sekunder berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, Salinan Putusan Kasasi Nomor: 573/K/Ag/2011, buku perundang-undangan, al-Qur'an, Hadits, fiqh munakahat, fiqh Imam madzhab, kamus, hukum acara perdata, dan buku-buku yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Serta hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bekasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif (*descriptive normative analysis*) dengan menggunakan pendekatan studi dokumen terhadap data sekunder dan data primer.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa mengenai putusan hakim Nomor: 21/P/K/Ag/2013 tentang pembatalan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak sah belum sesuai

dengan hukum perdata, karena pada dasarnya dalam kasus perdata materiil kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil. Sehingga novum yang diajukan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali, sudah cukup sebagai pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, karena secara formil novum sudah membuktikan bahwa Arman Jamaing merupakan wali nikah yang sah. Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan adalah bahwa novum bukan bersifat menentukan dan tidak terdapat kekeliruan hakim dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dari *judex factie* dan *judex juris*.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Wali Nikah Tidak Sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita dapat syafa'atnya di yaumil akhir nanti. Amin.

Skripsi adalah tugas akhir yang harus dilalui dengan penuh semangat. Jatuh bangun sudah biasa di awal pengajuan judul skripsi, akan tetapi putus asa dan sifat pesimis harus disingkirkan jauh dari benak kita. Kata syukur selalu penulis haturkan, karena pada sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH”, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Namun demikian dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan para pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I., selaku pembimbing I dan Ibu Brilliyah Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
5. Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
6. Bapak Drs. Amri, SH., MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Bekasi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu selaku staf perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

9. Teman-teman AS A angkatan 2012 atas suka dan duka yang telah dijalani bersama.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan senantiasa akan Allah balas dengan imbalan yang setimpal. Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 Mei 2016

Penulis,

Khumairoh Bilkis
NIM. 122111019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Telaah Pustaka	17
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN UPAYA HUKUM

A. Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	34

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	43
B. Pembatalan Perkawinan	46
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan ...	46
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	48
3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan	51
4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	53
5. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	55
C. Upaya Hukum	56
1. Pengertian dan Macam-Macam Upaya Hukum	56
2. Upaya Hukum Banding	57
3. Upaya Hukum Kasasi	61
4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali ...	63

BAB III PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH

A. Gambaran Umum tentang Mahkamah Agung	75
1. Pembentukan Mahkamah Agung	75
2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung .	78

3. Kedudukan Mahkamah Agung	80
4. Kewenangan Mahkamah Agung	83
B. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013 tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Wali Nikah yang Tidak Sah	84
1. Proses Perkara di Pengadilan Agama .	84
2. Proses Perkara di Pengadilan Tinggi Agama	110
3. Proses Perkara Kasasi	115
4. Proses Perkara Peninjauan Kembali ...	120

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH

A. Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013 tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Wali Nikah yang Tidak Sah	130
1. Analisis Putusan Pengadilan Agama ..	130
2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama	136
3. Analisis Putusan Kasasi	140

4. Analisis Putusan Peninjauan Kembali	143
B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Perkara Nomor 21/PK/Ag/2013 ...	149

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran-saran	160
C. Penutup	161

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya keabsahan perkawinan itu disandarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan. Dimana hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹

Menurut syari’at Islam, perkawinan sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Dalam buku Fiqih Imam Syafi’i, rukun dan syarat perkawinan adalah:

a. *Shighat* (ijab dan *qabul*).

Syarat *shighat* ada empat:

1. Diucapkan dengan sharih (jelas);
2. Menggunakan kata “...kawinkan” atau “...nikahkan”;
3. *Shighat* ijab (pernyataan menikahkan) diucapkan secara sempurna, dan *shighat qabul* (pernyataan menerima pernikahan) harus disampaikan segera setelah ijab;
4. Nikah harus diniatkan untuk selamanya. Artinya, tidak sah membatasi pernikahan dengan batas waktu tertentu.

¹ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: tp. 1999, h. 15.

- b. Calon suami, syarat-syaratnya: (baligh dan berakal).
- c. Calon isteri, syarat-syaratnya: (baligh dan berakal).
- d. Dua orang saksi, syarat untuk dua orang saksi: (1) merdeka; (2) laki-laki; (3) adil meski hanya segi zhahir; (4) bisa mendengar; dan (5) bisa melihat.
- e. Wali, syarat-syarat wali: (1) laki-laki; (2) mukallaf; (3) merdeka; (4) muslim; (5) adil; dan (6) berakal.²

Apabila salah satu rukun dan syarat di atas tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah atau batal. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³ Selain itu, kutipan buku (Prof. Ahmad Rofiq) mengutip dari Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah:

الزَّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالزَّكَاحُ
الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالزَّكَاحُ الْفَاسِدُ
وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَحِدٌ.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, h. 453-459.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 544.

Artinya: “*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah*”.⁴

Fasakh nikah adalah melepaskan dan mengurai ikatan yang terjalin antara pasangan suami istri.⁵ *Fasakh* merupakan salah satu dari empat bentuk putusnya perkawinan. Empat bentuk tersebut diantaranya: *Pertama*, putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu mati salah seorang suami istri. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu yang disebut *talaq*. *Ketiga*, putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan adanya sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, yang disebut *khulu'*. *Keempat*, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, yang disebut dengan *fasakh*.⁶

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum pernikahan yang tidak sah. Menurut Ulama Hanafiah, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang cacat di dalam rukun atau

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 1, 2013, h. 120.

⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, et al., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. 1, 2013, h. 534.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006, h. 197.

salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Hukum pernikahan yang tidak sah adalah bahwa pernikahan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apapun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak diharamkan menggauli si perempuan,, tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah, ketaatan si perempuan, serta mereka tidak dapat saling mewarisi. Jika hal ini terjadi hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa dan tidak ada masa 'iddah setelahnya.⁷

Menurut ulama Malikiah, tidak sah dan cacat adalah satu makna. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sah ataupun cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Hukum-hukum dalam pernikahan yang rusak dan tidak sah, yaitu: *Pertama*, diharamkan dan wajib untuk membatalkannya langsung, demi menghindari perbuatan maksiat. Jika belum terjadi hubungan intim, maka tidak ada hak apapun bagi si perempuan. Hal ini sesuai kaidah fiqih:

كُلُّ نِكَاحٍ فَسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى
فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَانَ الْفَسَادُ لِعَقْدِهِ أَوْ لِمَدَقَّةِ أَوْلَهُمَا.

Artinya: “Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun,

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 108-109.

baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan akadnya maupun karena maharnya, atau karena keduanya”.

Sedangkan jika sudah terjadi hubungan intim ada tiga macam: (1) wajib membatalkannya selamanya meskipun hubungan intim telah lama terjadi, apabila pernikahan tersebut rusak karena *shigat* (ijab kabul); (2) tidak wajib membatalkannya, bahkan tetap sah yaitu apabila kecacatan karena mahar; dan (3) wajib membatalkannya jika hubungan intim terjadi belum terlalu lama dengan batasan waktu tiga tahun, dan tidaklah batal jika hal itu sudah lama terjadi. *Kedua*, tetapnya hubungan kemahraman *mushaharah*, sebab telah terjadi *wathi'* atau sekedar pendahuluan hubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. *Ketiga*, seorang wanita diwajibkan ber-*iddah* jika suaminya telah berhubungan intim dengannya, kemudian akadnya *difasakh* baik akad itu disepakati atau diperselisihkan kecacatannya. Masa *'iddah* itu dimulai sejak mereka *difasakh*.⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama, yaitu salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya

⁸ *Ibid.*, h. 109-112.

konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *mushahahar*, tetapnya nasab dan 'iddah.⁹

Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua macam: *Pertama*: pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu nikah *syighar*, nikah *muhallil*, nikah *mut'ah*, dan nikah *mu'allaq* (bersyarat). *Kedua*: pernikahan sah tanpa ada syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah.¹⁰

Alasan terjadinya *fasakh* secara garis besar dibagi menjadi dua sebab: *Pertama*: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. *Fasakh* dalam bentuk ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Dengan alasan bahwa perkawinan itu jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat halangan (*mawani*') nikah, dimana hal ini secara ketentuan umum disepakati oleh semua pihak bahwa perkawinan dalam bentuk ini dinyatakan batal. *Kedua*: *fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada

⁹ *Ibid.*, h. 114.

¹⁰ *Ibid.*, h. 116-117.

suami atau istri atau keduanya sekaligus. Dalam kajian fiqih, *fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*. *Fasakh* dalam bentuk ini yang banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih.¹¹

Fasakh nikah dalam bentuk pertama juga diatur dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.¹²

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 70 dan 71 sebagai berikut.

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

¹¹ Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 243-245.

¹² Subekti, *Kitab ...*, h. 545.

- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹³

Mengenai orang-orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23

¹³ Departemen Agama RI, *Instruksi ...*, h. 39-40.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁴

Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana bagi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa batalnya perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.¹⁵

Pengaturan beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan dan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 74:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.¹⁶

¹⁴ Rofiq, *Hukum ...*, h. 123.

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 256.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Instruksi ...*, h. 41-42.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ". (رواه الترمذي)¹⁷

Artinya: Telah menceritakan ‘Ali bin Hujr. Memberitahukan Syarik bin Abdillah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Qutaibah. Memberitahukan Abu ‘Awanah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Bundarun. Telah menceritakan Abdurrahman bin Mahdi dari Isroil, dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Abdullah

¹⁷ al-Imam Hafidz Abi al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakafuri, *Tuhfat al-Ahwadzi*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990, h. 191.

bin Abi Ziyad. Memberitahukan Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata: "Rasulullah SAW bersabda 'Tidak ada nikah melainkan dengan wali'.". (HR. Tirmidzi)¹⁸

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَجْرُوا، فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ". (رواه الترمذي)¹⁹

Artinya: Telah menceritakan Ibnu Abi Umar. Memberitahukan Sufyan bin 'Uyaynah dari Ibni Huraij dari Sulaiman, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan mana saja yang bernikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah disetubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si laki-laki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda pendapat (berselisih), maka sultan

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, h. 25.

¹⁹ al-Mubarakafuri, *op.cit.*, h. 192.

(penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". (HR. Tirmidzi)²⁰

Wali nikah ada dua macam: *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.²¹

Menurut Imam Syafi'i urutan wali dalam pernikahan ialah: (1) ayah, (2) kakek, (ayahnya ayah), (3) saudara laki-laki sekandung, (4) saudara laki-laki seayah, (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan), (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, (7) paman dari ayah yang sekandung atau seayah, (8) anak dari keduanya dan seterusnya, baru kemudian (9) hakim. Mereka tidak boleh menikahkan jika wali yang lebih dekat kekarabatanya dengan mempelai wanita masih ada.²²

Hal ini juga diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan

²⁰ ash-Shiddieqy, *op.cit.*

²¹ Rofiq, *Hukum ...*, h. 66.

²² Zuhaili, *Fiqih Imam ...*, h. 463.

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.²³

Adapun hukum pernikahan yang dilakukan wali *ab'ad* ketika wali *aqrab* tidak hadir. Yaitu apabila wali *aqrab* ada maka wali *ab'ad* tidak berhak menjadi wali. Imam Abu Hanifah berpendapat apabila wali *aqrab* sedang berpergian dan si pelamar yang *sekufu'* tidak mau menunggu wali itu (untuk dimintai pendapat), maka perwalian berpindah kepada urutan wali berikutnya. Dan setelah wali yang berpergian itu kembali, dia tidak memiliki hak untuk menolak apa yang telah dilakukan wali yang menggantikannya. Dalam hal ini Imam Malik sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat, apabila perempuan dinikahkan oleh wali yang garis kekerabatannya lebih jauh ketika wali yang memiliki garis kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya batal. Dan apabila wali *aqrab* sedang berpergian maka wali setelahnya

²³ Departemen Agama RI, *Instruksi ...*, h. 21.

tidak boleh menikahkannya. Adapun orang yang berhak menikahkannya adalah hakim.²⁴

Perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap tidak ada, yaitu:

- a. Wali *aqrab* tidak ada sama sekali.
- b. Wali *aqrab* ada, tetapi belum baligh.
- c. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila.
- d. Wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena sudah tua.
- e. Wali *aqrab* ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.
- f. Wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.²⁵

Menurut jumhur ulama, di antaranya Malik, Tsauri, Laits, dan Syafi'i berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan adalah '*ashabah*. Paman dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, dan seluruh *dzawil arham* tidak memiliki hak perwalian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terj. Moh. Abidun, et al., Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. ke-2, 2010, h. 384-385.

²⁵ Rofiq, *Hukum ...*, h. 68.

penguasa yang bertindak sebagai wali. Sementara itu, menurut Abu Hanifah, para kerabat selain '*ashabah* boleh menjadi wali dalam pernikahan.²⁶

Salah satu kasus pembatalan perkawinan ialah yang terjadi dalam perkara putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013. Sebelumnya, permohonan ini diajukan oleh suami pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bekasi dengan segala pertimbangan hakim memutus menerima permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan yang dibuktikan oleh Pemohon (suami) bahwa ketika akad perkawinan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon (paman dari ibu).

Kemudian perkara tersebut sampai pada upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon (istri) dengan alasan adanya novum (bukti baru), yaitu Akta Kelahiran Termohon (istri) dengan nama Bapak kandung yang sebelumnya Pemohon (suami) dalam dalil gugatannya, bahwa nama Bapak Termohon (istri) yang tertera dalam Akta Kelahiran adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon yang menjadi wali nikah pada saat itu sebagai alasan permohonan pembatalan perkawinan. Selain bukti baru, Termohon (istri) mengungkapkan adanya kekhilafan hakim yaitu pertimbangan hukum pada tingkat peradilan sebelumnya (tingkat Kasasi) tidak mengacu pada

²⁶ Sabiq, *op.cit.*, h. 381-382.

perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (istri) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebelum adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (suami).

Dalam pertimbangan hakim pada upaya hukum Peninjauan Kembali memutus menolak permohonan peninjauan kembali dengan alasan bukti yang diajukan tidak bersifat menentukan, padahal akta kelahiran sebagai bukti sudah memenuhi syarat bukti baru (*novum*) yaitu bukti sudah ada sejak sebelum adanya permohonan pembatalan perkawinan, dan belum pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Kemudian hakim tidak membenarkan adanya alasan kekeliruan dan kekhilafan hakim yang nyata.²⁷ Inilah yang menjadi topik penulisan skripsi untuk di analisa, apakah pertimbangan hakim Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penyusun akan melakukan penelitian tentang pembatalan perkawinan terhadap putusan Peninjauan Kembali dengan judul, **“ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH”**.

²⁷ Salinan Putusan Nomor: 21/PK/Ag/2013. (Lihat lampiran)

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013.
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 21/PK/Ag/2013.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam pembahasan skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Ilmiah akademik:
 - a. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 21/PK/Ag/2013.
2. Tujuan formal akademik dalam rangka memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata satu (S.1) di fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*)

yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁸ Penelitian yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya adalah:

Skripsi pertama karya Annisa Lutfi Aryani Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2012 dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg)". Penelitian tersebut menggunakan tiga metode penelitian, *pertama* metode pendekatan yuridis normatif, *kedua* menggunakan *field research*, *ketiga* sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang didapat bahwa Majelis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dan telah membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejak tanpa izin Pengadilan Agama. Dari perkawinan tersebut menjadikan hati penggugat menjadi tidak aman dan tidak tenteram. Dasar pertimbangan hukum, Majelis hakim dalam memutus perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg yaitu sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a) dan

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2010, h. 10.

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg sudah sesuai karena Majelis hakim telah membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena di dalam perkawinan tersebut terjadi penipuan dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami.²⁹

Skripsi kedua yaitu Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.) oleh Shofi Nur'aini Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2014. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Sumber data yang didapatkan yaitu data primer dan data sekunder serta wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi Semarang.

Hasil penelitian yang didapat bahwa mengenai putusan hakim Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang perkawinan yang dibatalkan setelah meninggalnya istri sudah sejalan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Kemadharatan tersebut adalah terkait dengan akibat hukum dari sengketa waris yang diwariskan kepada suami

²⁹ Annisa Lutfi Aryani, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg)", Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012.

ataukah saudara kandung almh. Ina Kusuma Dewi. Adapun dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara ini adalah Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan perkawinan dapat dimintakan pembatalan di antaranya adalah “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang” adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara, dimana dalam memutus perkara undang-undang harus dapat diterapkan dengan peristiwa konkritnya.³⁰

Skripsi ketiga yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan oleh Rina Rif'atin Ulfah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2011. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Sebagai sumber data dalam objek penelitian ini adalah hukum perkawinan di Indonesia, fikih munakahat dan wawancara dengan ahli hukum dan advokad LKBHI UIN Walisongo Semarang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan. *Pertama*, status harta bersama dalam pembatalan perkawinan menurut hukum

³⁰ Shofi Nur'aini, “Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.)”, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

perkawinan di Indonesia yaitu, harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan seperti halnya perkawinan yang putus karena perceraian yaitu diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan penyelesaiannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97. *Kedua*, status harta bersama dalam fikih munakahat yaitu, harta bersama dalam perkawinan tetap ada, dan diwujudkan melalui tiga hal yakni, *pertama*, akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidza*, sebuah ikatan yang kokoh, *kedua*, *syirkah* yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya dan *ketiga*, *‘urf* yakni kebiasaan dalam sebuah masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dan status harta bersama tersebut menjadi akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan yang berarti tidak diberlakukan surut.³¹

Skripsi keempat karya Iin Zefanya Lien Sebesty dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 dengan judul “Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan

³¹ Rina Rif’atin Ulfah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan”, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.

masalah dengan berdasarkan pada aturan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya berdasarkan data yang ada.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor:1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.³²

Dari beberapa karya yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berbeda karena fokus kajiannya menganalisis mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak sah. Dalam hal ini penulis akan meneliti putusan pada upaya hukum Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2103 tentang pembatalan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak sah. Dan sepanjang pengetahuan penulis, pembahasan ini belum pernah dilakukan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah metode penelitian yang berkenaan dengan metode data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan

³² Iin Zefanya Lien Sebesty, “Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)”, Skripsi, Makassar: Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.

penelitian.³³ Penelitian yang akan dikaji yaitu putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013 yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan. Pokok kajian pendekatan ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³⁴ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁵ Bahan hukum primer yang akan dikaji peneliti adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum.³⁶ Kajian tersebut berupa putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013.

³³ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. 1, 2004, h. 3.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 17.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali 1985, h. 14.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-7, 2011, h. 146.

b. Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap dari sumber data primer yaitu mencakup karya ilmiah, buku-buku dan lainnya.³⁷ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah berkas salinan putusan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, al-Qur'an, Hadits, fiqh munakahat, fiqh Imam madzhab, kamus, hukum acara perdata, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan kajian penelitian ini. Serta hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Bekasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁸ Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah studi dokumen yaitu data dokumen yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan sumber data lain, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini serta perundang-undangan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1942, h. 12.

³⁸ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-3, 1988, h. 211.

4. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif normatif (*descriptive normative analysis*) dengan menggunakan pendekatan studi dokumen terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum, yaitu mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik dari isu hukum yang diteliti kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku.³⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana penulisan hasil penelitian skripsi⁴⁰ yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi dengan menguraikan isi penulisan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁹ Marzuki, *Penelitian ...*, h. 27.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Pedoman ...*, h. 15.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN UPAYA HUKUM

Pada bab ini menguraikan gambaran umum atau disebut dengan kajian teoritik yang terdiri atas tiga sub-bab yaitu perkawinan, pembatalan perkawinan, dan upaya hukum. Sub pertama berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. Sub kedua tentang pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sub ketiga tentang pengertian dan macam-macam upaya hukum, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali.

BAB III PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH

Bab ini berisi penjelasan yang bersumber dari data primer, yaitu gambaran umum tentang Mahkamah Agung dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013 tentang pembatalan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak sah.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH

Pada bab ini merupakan inti dari skripsi ini yaitu berisi tentang analisis putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013 tentang pembatalan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak sah dan akibat hukum pembatalan perkawinan dalam putusan perkara Nomor 21/PK/Ag/2013.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN UPAYA HUKUM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan *an-nikh* dan *at-tazwij*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ - يوطأ - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.⁴¹ *Adh-dhammu* berasal dari kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضم - يضم - ضما), yang berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.⁴² Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع - يجمع - جمعا), berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.⁴³

Sebutan lain untuk perkawinan ialah *at-tazwij* yang diambil dari kata *zawwaja - yuzawwiju - tazwijan* (زوّج - يزوّج - تزويج).

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984, h. 1671.

⁴² *Ibid.*, h. 887.

⁴³ *Ibid.*, h. 225.

تزويجا) – secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa adanya pelanggaran terhadap agama.⁴⁵

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian madzhab Maliki, “Nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan seksual semata-mata”. Menurut madzhab Syafi’iah nikah dirumuskan dengan “Akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* atau makna dari keduanya”. Ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “Akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan”.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, h. 630.

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 962.

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h. 45.

Menurut Prof. Subekti, definisi perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁷ Demikian pula dalam peraturan perundang-undangan, definisi perkawinan termaktub dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang merumuskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan definisi perkawinan dalam Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, karena menikah merupakan salah satu sunnah Nabi Saw, sebagaimana hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا
 حَمِيدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ

⁴⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980, h. 23.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ! قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، أَتَزَوَّجُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَلَا أَنَامُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِي قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري)^{٤٨}

Artinya: Telah menceritakan Sa'id bin Abi Maryam, memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ja'far memberitahukan kepada kami Hamid bin Abi Hamid ath-Thawil bahwasanya Anas bin Malik ra. mendengar ia berkata, "Ada tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah SAW untuk bertanya tentang ibadah Nabi SAW ketika mereka diberitahukan tentang ibadahnya seakan-akan mereka menganggapnya sedikit, Mereka berkata, 'Dimana posisi kita dibanding Rasulullah

⁴⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. h. 237.

SAW? Allah telah mengampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang!'. Salah seorang mereka berkata, 'Adapun aku akan shalat malam selamanya'. Orang yang lain berkata, 'Aku akan puasa sepanjang masa dan tak pernah berhenti puasa'. Orang yang satunya lagi berkata, 'Aku akan menghindari perempuan dan tidak menikah selamanya'. Maka Rasulullah SAW kemudian mendatangnya dan berkata, 'Apakah kalian yang berkata begini dan begini? Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya, hanya saja aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan aku tidur, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka ia bukanlah golonganku'." (HR. Bukhari)⁴⁹

Asbabul wurud dari hadis di atas bahwa ada tiga orang laki-laki datang ke rumah istri Rasulullah Saw. untuk menanyakan masalah ibadah beliau. Ketika diceritakan kepada mereka, mereka seakan-akan bertanya-tanya. Lalu mereka berkata, "Dimana posisi kami dibandingkan Rasulullah? Padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lampau". Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Adapun saya akan shalat malam terus menerus". Orang kedua berkata, "Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka". Orang yang ketiga berkata, "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah". Maka Rasulullah

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 4, Terj. Rahmatullah et al., Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1, 2013, h. 750-751.

Saw. datang kepada mereka, lalu beliau bersabda, “Kalian berkata begini dan begitu. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah, tetapi aku shalat dan tidur”.⁵⁰

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.⁵¹

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau

⁵⁰ Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 222.

⁵¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 90.

peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.⁵²

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam buku Fiqih Imam Syafi’i, rukun dan syarat perkawinan adalah:

a. Shighat (ijab dan qabul).

Syarat shighat ada empat:

1. Diucapkan dengan sharih (jelas);
2. Menggunakan kata “...kawinkan” atau “...nikahkan”;
3. Shighat ijab (pernyataan menikahkan) diucapkan secara sempurna, dan shighat qabul (pernyataan menerima pernikahan) harus disampaikan segera setelah ijab;
4. Nikah harus diniatkan untuk selamanya. Artinya, tidak sah membatasi pernikahan dengan batas waktu tertentu.

b. Calon suami, syarat-syaratnya: (baligh dan berakal).

c. Calon isteri, syarat-syaratnya: (baligh dan berakal).

⁵² *Ibid.*, h. 92.

- d. Dua orang saksi, syarat untuk dua orang saksi: (1) merdeka; (2) laki-laki; (3) adil meski hanya segi zhahir; (4) bisa mendengar; dan (5) bisa melihat.
- e. Wali, syarat-syarat wali: (1) laki-laki; (2) mukallaf; (3) merdeka; (4) muslim; (5) adil; dan (6) berakal.⁵³

Mengenai rukun perkawinan di atas, para Imam madzhab lain juga sependapat dua orang saksi sebagai syarat sahnya perkawinan.⁵⁴ Akan tetapi ulama Hanafiah tidak mensyaratkan kehadiran wali nikah, sebagaimana Imam madzhab lainnya sepakat bahwa wali sebagai syarat sahnya perkawinan.⁵⁵ Selain dua orang saksi dan wali nikah, sebagai rukun dari perkawinan, jumhur ulama sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan adanya sighat (ijab dan qabul) dan kedua mempelai (laki-laki dan perempuan).⁵⁶

Wali nikah merupakan salah satu rukun yang menjadi syarat sahnya perkawinan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam hadits disebutkan:

⁵³ Zuhaili, *Fiqh Imam ...*, h. 453-459.

⁵⁴ Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 73.

⁵⁵ *Ibid*, h. 83.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., et al., Jakarta: Lentera, Cet. ke-6, 2007, h. 309 dan 315.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". (رواه الترمذي)⁵⁷

Artinya: Telah menceritakan 'Ali bin Hujr. Memberitahukan Syarik bin Abdillah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Qutaibah. Memberitahukan Abu 'Awanah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Bundarun. Telah menceritakan Abdurrahman bin Mahdi dari Isroil, dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Abdullah bin Abi Ziyad. Memberitahukan Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata: "Rasulullah SAW bersabda 'Tidak ada nikah melainkan dengan wali'.". (HR. Tirmidzi)⁵⁸

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

⁵⁷ al-Mubarakafuri, *Tuhfat* ..., h. 191.

⁵⁸ ash-Shiddieqy, *Koleksi* ..., h. 25.

عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا
 امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا
 بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ
 مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اسْتَجَرُوا، فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ
 لَهُ". (رواه الترمذي)⁵⁹

Artinya: *Telah menceritakan Ibnu Abi Umar. Memberitahukan Sufyan bin 'Uyaynah dari Ibnu Huraij dari Sulaiman, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan mana saja yang bernikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah disetubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si laki-laki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". (HR. Tirmidzi)⁶⁰*

Diriwayatkan pula dari Juraij, ia berkata, "Ikrimah bin Khalid telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'Aku pernah berjalan bersama suatu rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat seorang janda, maka wanita ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki di antara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang disertai urusan itu menikahkan

⁵⁹ al-Mubarakafuri, *op.cit.*, h. 192.

⁶⁰ ash-Shiddieqy, *op.cit.*

wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khattab mendera laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya’.”⁶¹

Wali nikah ada dua macam: *Pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁶²

Urutan wali nasab diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Wali nasab terdiri atas empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

⁶¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 437-439.

⁶² Rofiq, *Hukum ...*, h. 66.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁶³

Selain itu, Imam madzhab juga berbeda pendapat dalam urutan wali nikah. Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki dari wanita yang akan menikah itu, jika memang dia mempunyai anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut, cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara seayah), anak paman dan seterusnya.

Imam Malik mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Setelah semuanya itu tidak ada perwalian beralih kepada hakim.

Menurut Imam Syafi'i urutan perwalian yaitu, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ke tangan hakim.

⁶³ Departemen Agama RI, *Instruksi ...*, h. 21.

Imam Hambali memberikan urutan: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ke tangan hakim.⁶⁴

Sedangkan untuk syarat wali, seluruh madzhab sepakat bahwa syarat wali adalah: baligh, Islam, dan laki-laki. Adapun syarat *'adalah*, adalah syarat bagi hakim dan bukan wali yang dekat. Sebagai pengecualian, Imam Hambali mensyaratkan *'adalah* bagi setiap wali, baik wali hakim maupun wali yang dekat.⁶⁵

Sesuai dengan urutan wali nikah di atas, maka jika wali terdekat yang memenuhi syarat kewalian ada, maka tidak ada hak bagi wali yang jauh. Jika wali yang jauh dengan lancang menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang yang semisal itu, tanpa seizin wali yang dekat, maka akad nikahnya tergantung kepada izin wali terdekat. Apabila wali terdekat tidak ada, sehingga peminang tidak bisa menunggu kedatangannya, maka hak wali berpindah kepada wali berikutnya, sehingga tidak hilang kemaslahatan.

Menurut madzhab Ahmad, bagi wali yang ghaib dia tidak boleh menentang apa yang dilakukan oleh wali yang lebih jauh darinya, jika dia pergi sehingga kepergiannya dianggap menghilangkan hak kewalian dia, sehingga haknya

⁶⁴ Mughniyah, *Fiqih ...*, h. 347-348.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 349.

pindah ke wali berikutnya. Imam Syafi'i berkata, "Jika wali yang jauh menikahkan seorang wanita, kemudian wali yang dekat datang, maka nikahnya batal. Dan jika wali yang dekat pergi, tidak boleh bagi wali yang jauh menikahnya, dan yang menikahkan adalah hakim". Imam Malik sepakat dengan pendapat Abu Hanifah tentang pindahnya hak wali kepada wali yang jauh, jika dalam keadaan wali yang dekat tidak ada.⁶⁶

Hak kewalian berpindah kepada hakim dalam dua kondisi berikut:

1. Terjadi perselisihan di antara para wali, sehingga tidak membuahkan jalan keluar, padahal pernikahan harus disegerakan.
2. Jika wali tidak ada secara mutlak dan terbukti ketiadaannya. Dalam kondisi demikian, jika datang seorang laki-laki kepada seorang wanita dewasa untuk menikahnya; laki-laki itu setara dengan wanita tersebut; sementara tidak ada seorang wali pun dari wanita itu, baik yang dekat maupun yang jauh; maka bagi hakim dalam kondisi ini berhak menikahkan wanita itu. Kecuali, jika si wanita dan juga laki-lakinya rela menunggu kedatangan wali yang masih diharapkan kedatangannya.⁶⁷

⁶⁶ al-Faifi, *Ringkasan ...*, h. 452-453.

⁶⁷ *Ibid.*, h. 455.

Hal ini sesuai dengan potongan hadits Aisyah yang telah dikemukakan di atas:

...السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ...

Artinya: “Penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Selain itu, tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah memenuhi perintah Allah SWT sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam al-Qur’an Surah ar-Ruum: 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

*terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*⁶⁸

Hikmah pernikahan adalah menjalin hubungan kekeluargaan dan menguatkan pilar-pilar kasih sayang antara beberapa keluarga serta menguatkan hubungan sosial kemasyarakatan yang diberkahi dalam Islam.⁶⁹ Dengan adanya pernikahan akan membuat seseorang merasa tentram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tentramlah perasaan orang yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan pasangan.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan manusia akan memakmurkan hidup dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Per-kata*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007, h. 406.

⁶⁹ al-Faifi, *op.cit.*, h. 403.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Dimana di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan, hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa dan kasih sayang.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. al-Qur'an telah memberikan isyarat dalam Surah an-Nisa' ayat 24:

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ...

Artinya: "...Dan Dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina..."⁷⁰

⁷⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 82.

4. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua tujuan pernikahan di atas merupakan perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin, dan keutamaan memimpin rumah tangga sangatlah agung.⁷¹

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “batal” artinya tidak berlaku, tidak sah: perjanjian yang dinyatakan.⁷² Secara hukum, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Jadi, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. ke-2, 2011, h. 39-41.

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus ...*, h. 145.

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau yang diharamkan oleh agama.⁷³ Sedangkan pembatalan perkawinan yaitu proses atau perbuatan membatalkan suatu ikatan perkawinan yang diajukan sesudah dilangsungkannya akad nikah.⁷⁴

Fasakh nikah adalah melepaskan dan mengurai ikatan yang terjalin antara pasangan suami istri.⁷⁵ *Fasakh* merupakan salah satu dari empat bentuk putusnya perkawinan. Empat bentuk tersebut di antaranya: *Pertama*, putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu mati salah seorang suami istri. *Kedua*, putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu yang disebut *talaq*. *Ketiga*, putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan adanya sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, yang disebut *khulu'*. *Keempat*, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, yang disebut dengan *fasakh*.⁷⁶

⁷³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi 1, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2010, h. 195.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-2, 2007, h. 37.

⁷⁵ al-Faifi, *Ringkasan ...*, h. 534.

⁷⁶ Syarifuddin, *Hukum ...*, h. 197.

Kutipan buku (Prof. Ahmad Rofiq), mengutip dari Abd al-Rahman al-Juzairy menyatakan dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah:

النَّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنَّكَاحُ
الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنَّكَاحُ الْفَاسِدُ
وَالْبَاطِلُ حُكْمُهَا وَحِدٌ.

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah”.⁷⁷

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan dinilai dari hukum agamanya masing-masing ketika perkawinan tersebut dilakukan. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang hukum pernikahan yang tidak sah. Menurut ulama Hanafiah, pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang cacat di dalam rukun atau salah satu syarat pelaksanaan pernikahan. Hukum pernikahan yang tidak sah adalah bahwa pernikahan ini tidak

⁷⁷ Rofiq, *Hukum ...*, h. 120.

mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak diharamkan menggauli si perempuan, tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah, ketaatan si perempuan, serta mereka tidak dapat saling mewarisi. Diwajibkan tidak terjadi hubungan intim di antara mereka berdua. Jika hal ini terjadi, hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa dan tidak ada masa 'iddah setelahnya.⁷⁸

Menurut ulama Malikiyah, tidak sah dan cacat adalah satu makna. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sah ataupun cacat adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Hukum-hukum dalam pernikahan yang rusak dan tidak sah, yaitu: *Pertama*, diharamkan dan wajib untuk membatalkannya langsung, demi menghindari perbuatan maksiat. Jika belum terjadi hubungan intim, maka tidak ada hak apa pun bagi si perempuan. Hal ini sesuai kaidah fiqih:

كُلُّ نِكَاحٍ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى
فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَانَ الْفَسَادُ لِعَقْدِهِ أَوْ لِمَصَادَقَةٍ أَوْ لَهُمَا.

Artinya: “Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang

⁷⁸ Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., h. 108-109.

disepakati kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan akadnya maupun karena maharnya, atau karena keduanya”.

Sedangkan jika sudah terjadi hubungan intim ada tiga macam: (1) wajib membatalkannya selamanya meskipun hubungan intim telah lama terjadi, apabila pernikahan tersebut rusak karena *shigat* (ijab kabul); (2) tidak wajib membatalkannya, bahkan tetap sah yaitu apabila kecacatan karena mahar; dan (3) wajib membatalkannya jika hubungan intim terjadi belum terlalu lama dengan batasan waktu tiga tahun, dan tidaklah batal jika hal itu sudah lama terjadi. *Kedua*, tetapnya hubungan kemahraman *mushaharah*, sebab telah terjadi *wathi'* atau sekedar pendahuluan hubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. *Ketiga*, seorang wanita diwajibkan ber-*iddah* jika suaminya telah berhubungan intim dengannya, kemudian akadnya *difasakh* baik akad itu disepakati atau diperselisihkan kecacatannya. Masa '*iddah* itu dimulai sejak mereka *difasakh*.⁷⁹

Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 109-112.

Ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama, yaitu salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *mushaharah*, tetapnya nasab dan *'iddah*.⁸⁰

Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua macam: *Pertama*: pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu nikah *syighar*, nikah *muhallil*, nikah *mut'ah*, dan nikah *mu'allaq* (bersyarat). *Kedua*: pernikahan sah tanpa ada syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah.⁸¹

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan

Pembatalan perkawinan dibahas di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 22 disebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, dimana batalnya perkawinan tersebut kembali pada hukum agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

⁸⁰ *Ibid.*, h. 114.

⁸¹ *Ibid.*, h. 116-117.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Dalam hal mengajukan permohonan pembatalan perkawinan undang-undang ini mengatur kepada siapa permohonan tersebut diajukan, dimana hal ini termuat dalam Pasal 25 yaitu, “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Sebab atau dasar utama yang dapat dimintakan pembatalan perkawinan, terdapat dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Selain itu, Pasal 27 juga menyatakan:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Berlakunya pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 28 ayat (1), yang menguraikan bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.⁸²

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pertimbangan hukum perdata mengatur pembatalan perkawinan di dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Dalam Pasal 70 dan 71 disebutkan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan dan dapat dimintakan batal perkawinannya kepada pejabat hukum, di antaranya apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat

⁸² Subekti, *Kitab ...*, h. 544-546.

orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;

- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya;
- f. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- g. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- h. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- i. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- j. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- k. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pengaturan beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan dan mulai berlakunya keputusan pembatalan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 74:

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁸³

5. Pihak – Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Orang-orang yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁸⁴

⁸³ Departemen Agama RI, *Instruksi ...*, h. 39-42.

⁸⁴ Rofiq, *Hukum ...*, h. 123.

C. Upaya Hukum

1. Pengertian dan Macam – Macam Upaya Hukum

Upaya hukum yaitu suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Jenis-jenis upaya hukum:

1. Upaya hukum melawan gugatan:
 - a. Eksepsi;
 - b. Rekonvensi (gugat balik);
 - c. Minta vrijwaring;
2. Upaya hukum melawan putusan:
 - a. Upaya hukum biasa:
 - Verzet;
 - Banding;
 - Kasasi;
 - b. Upaya hukum luar biasa (istimewa):
 - Request civil (Peninjauan Kembali);
 - Derden verzet;
3. Upaya hukum melawan sita:
 - a. Verzet yang bersangkutan;
 - b. Verzet pihak ketiga;
4. Upaya hukum melawan eksekusi:

- a. Verzet yang bersangkutan;
- b. Verzet pihak ketiga;
- 5. Upaya hukum untuk mencampuri proses:
 - a. Intervensi (tussenkomst = mencampuri);
 - b. Voeging (turut serta pada salah satu pihak);
 - c. Vrijwaring (ditarik sebagai penjamin);
- 6. Upaya hukum pembuktian:
 - a. Saksi;
 - b. Tulisan;
 - c. Dugaan /prasangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah; dan sebagainya dengan alat bukti yang sah.

Semua itu merupakan suatu upaya hukum terhadap suatu sengketa yang telah diproses di Pengadilan. Sedangkan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan oleh orang lain atau untuk sesuatu kepentingan hukum baginya yang belum diproses di Pengadilan ialah mengajukan perkara ke Pengadilan.⁸⁵

2. Upaya Hukum Banding

Banding ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh

⁸⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000, h. 279-280.

Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama.

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan *judex factie*, yaitu Pengadilan yang memeriksa duduknya perkara berdasarkan bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta. Oleh sebab itu banding disebut juga dengan peradilan ulangan, yaitu memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada.

Permohonan banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama yang di daerah hukumnya meliputi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutusnya.⁸⁶

Pengajuan tingkat banding harus memenuhi syarat-syarat banding, di antaranya syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding (Pasal 6 UU No. 20/1947), kecuali kuasa hukumnya.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 280-281.

- b. Diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding, yaitu:
- Bagi pihak yang berkedioman di daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya ialah 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.
 - Bagi pihak yang berkedioman di luar daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut, maka masa bandingnya ialah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20/1947).
 - Dalam hal permohonan banding dengan prodeo, maka masa banding dihitung mulai hari berikutnya dari hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tingkat Agama tentang ijin berperkara secara prodeo tersebut diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 20/1947).
- c. Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding. Yaitu putusan akhir yang bersifat negatif, maupun yang bersifat positif.

- Putusan yang bersifat negatif yaitu putusan yang diambil dan dijatuhkan bukan berdasarkan dari materi pokok perkara, tetapi berdasarkan pada alasan formil, yakni gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, sehingga amar putusan yang dijatuhkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 - Putusan akhir yang bersifat positif yaitu putusan yang dijatuhkan berdasarkan materi pokok perkara. Putusan yang demikian telah menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh sengketa yang di perkarakan, sehingga kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak dengan objek perkara sudah selesai dan pasti.⁸⁷
 - Putusan sela tidak dapat dimohonkan banding, kecuali bersama-sama putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) UU No. 20/1947).
- d. Membayar panjar biaya banding, apabila belum dibayar maka Panitera Pengadilan Agama tidak boleh melayani permohonan banding, kecuali dalam hal prodeo.
- e. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.⁸⁸

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 90-92.

⁸⁸ Arto, *op.cit.*, h. 281-282.

3. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi artinya mohon pembatalan terhadap putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan Pengadilan tingkat banding (*judex factie*) ke Mahkamah Agung, melalui Pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Upaya hukum kasasi hanya dapat diajukan satu kali dan baru bisa digunakan kalau sudah mempergunakan upaya hukum banding.⁸⁹ Tugas Pengadilan kasasi dinilai menguji atau meneliti putusan Pengadilan di bawahnya (*judex factie*). Dasar dari pembatalan suatu putusan adalah “kesalahan penerapan hukum” yang dilakukan oleh Pengadilan di bawahnya.⁹⁰ Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex factie*, karena ini upaya hukum kasasi disebut dengan *judex juris*.

Pengajuan upaya hukum kasasi harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah:

- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi atau kuasa hukum.

⁸⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 224.

⁹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 100.

- b. Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- c. Putusan atau penetapan *judex factie*, menurut hukum dapat dimintakan kasasi, ialah putusan atau penetapan akhir yang diberikan pada tingkat terakhir dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu:
 - Putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi Agama, dan
 - Penetapan Pengadilan Agama dalam perkara voluntair yang menurut hukum tidak boleh dimintakan banding.
- d. Membuat memori kasasi yang memuat alasan-alasannya.
- e. Membayar panjar biaya kasasi.
- f. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk menyatakan kasasi dan dibuatkan Akta Permohonan Kasasi.⁹¹

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat di atas, Panitera wajib melayani sebagaimana mestinya. Dan yang berwenang menilai apakah syarat-syarat kasasi telah dipenuhi atau tidak adalah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.

⁹¹ Arto, *Praktek ...*, h. 293-294.

Di dalam pasal 30 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, mengatur bahwa alasan kasasi terbatas dalam tiga hal di bawah ini:

- a. Pengadilan yang telah mengadili perkaranya dianggap tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, dengan kata lain, bukan termasuk kompetensi absolut dari Pengadilan dimaksud untuk mengadili perkara tersebut.
- b. Pengadilan yang telah mengadili perkaranya dianggap telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁹²

4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

4.1. Pengertian Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa (*request civil*) yang merupakan upaya untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan Pengadilan (baik tingkat pertama, banding, dan kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap, guna membatalkannya. Permohonan peninjauan

⁹² Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Cet. 1, 1989, h. 89-90.

kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Disebut upaya hukum luar biasa karena upaya hukum peninjauan kembali adalah merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹³ Peninjauan kembali dimaksudkan, diajukan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan tingkat pertama yang dahulunya memutus, dengan alasan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu.

4.2. Syarat-syarat Permohonan Peninjauan Kembali

Dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, harus memenuhi syarat-syarat permohonan peninjauan kembali di antaranya adalah:

- a. Diajukan oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukum dan ahli warisnya.
- b. Putusan yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Membuat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
- d. Diajukan dalam tenggang waktu menurut undang-undang, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketahui untuk alasan-alasan peninjauan kembali.
- e. Membayar panjar biaya peninjauan kembali.

⁹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2005, h. 359-360.

- f. Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.⁹⁴

4.3. Alasan-alasan Peninjauan Kembali

Alasan-alasan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 67 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan

⁹⁴ Arto, *Praktek ...*, h. 304-305.

yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁹⁵

Dalam bukunya (Yahya Harahap), alasan dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali pada Pasal 67 huruf b ini, berkenaan dengan ditemukannya novum, maka:

- 1) Penerapan alasan ini terbatas pada bentuk alat bukti yang bernilai dan valid, seperti surat atau akta, bisa akta autentik atau akta di bawah tangan dan tidak meliputi alat bukti lain di luar alat bukti surat. Surat bukti yang dimaksud bukan bukti baru, tetapi surat bukti yang telah ada sebelum perkara diperiksa, akan tetapi tidak ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
- 2) Surat bukti yang memenuhi syarat alasan peninjauan kembali, harus bersifat menentukan, yaitu surat bukti itu berkualitas bersifat menentukan. Maksudnya, surat bukti itu memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai akta autentik atau akta di bawah tangan. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada surat bukti itu sempurna dan mengikat.

⁹⁵ C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, h. 57.

- 3) Surat bukti itu telah ada sebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara dimulai sampai putusan perkara itu BHT tidak ditemukan.⁹⁶

Alasan lain yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan peninjauan kembali adalah apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f).

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tidak membahas secara detail mengenai putusan hakim yang di dalamnya terkandung kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata. Di bawah ini beberapa pendapat Hakim Agung mengenai alasan peninjauan kembali yang didasarkan pada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Menurut Djafni Djamal, *“Kekhilafan hakim/kekeliruan nyata mengandung pengertian kalau kekeliruan itu salah dalam hukum acara tapi kalau kekhilafan hakim itu dalam hukum materil, dan sebaiknya alasan PK itu hanya satu yaitu novum saja, sedangkan untuk tipu muslihat itu hanya ada dalam kasasi”*.⁹⁷

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-2, 2008, h. 453-458.

⁹⁷ Djoni Witanto, *Penafsiran Pasal 67 Huruf F UU Mahkamah Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali*, Laporan Penelitian: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015, h. 57.

Takdir Rahmadi mengatakan, “*di Mahkamah Agung belum terdapat kesepakatan untuk membedakan alasan PK yang didasarkan pada kekhilafan hakim dengan alasan PK yang didasarkan pada kekeliruan nyata, dimana bisa saja dengan alasan kesalahan penerapan hukum, tidak dipertimbangkannya salah satu bukti atau adanya pertimbangan yang kurang kemudian diajukan sebagai bagian dari alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata*”.⁹⁸

Nurul Elmiyah mengatakan, “*di Mahkamah Agung tidak pernah dipakai kekeliruan yang nyata akan tetapi kebanyakan kekhilafan hakim, karena kekhilafan hakim berarti dia tidak melihat tapi kekeliruan berarti dia melihat namun pura-pura benar*”.⁹⁹

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa “kekhilafan hakim” sebagai alasan peninjauan kembali merupakan alasan yang didasarkan pada adanya kekhilafan hakim dalam putusan perkara, dimana kekhilafan hakim dalam putusan tersebut bukan merupakan bentuk kesengajaan dan bersifat tidak terlihat dengan jelas dalam putusannya tersebut, sedangkan “kekeliruan yang nyata” sebagai alasan peninjauan kembali merupakan alasan karena dalam putusan

⁹⁸ *Ibid.*, h. 58.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 59.

perkara perdata telah terlihat jelas atau terang adanya kesalahan atau kekeliruan.¹⁰⁰

Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali ditentukan dalam Pasal 69 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu 180 hari untuk semua alasan yang disebutkan dalam Pasal 67, namun cara menghitungnya berbeda untuk setiap alasan peninjauan kembali. Pada Pasal 67 huruf b cara menghitung tenggang waktu tersebut yaitu 180 hari dari tanggal ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, sedangkan pada alasan huruf f yaitu 180 hari dari tanggal putusan BHT dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.¹⁰¹

4.4. Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali

Mengenai tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 72 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diuraikan:

a. Disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, yang maksudnya permohonan tersebut harus disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 90.

¹⁰¹ Harahap, *Kekuasaan Mahkamah ...*, h. 475.

- b. Permohonan berbentuk tertulis dan menyebut alasan.

Dalam surat permohonan harus mencantumkan se jelas-jelasnya alasan yang menjadi dasar permohonan. Kalau pemohon tidak pandai menulis, boleh diuraikan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan, atau hakim yang ditunjuk.

- c. Membayar perkara yang diperlukan.

Selama biaya perkara belum dilunasi pemohon, pelaksanaan administrasi yustisial atas permohonan tertunda, dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung tidak bisa dilaksanakan. Tentang jumlah biaya perkara disesuaikan menurut yang diperlukan.

- d. Mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.

Panitera wajib mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan setelah pemohon membayar biaya perkara.

- e. Pengiriman salinan permohonan kepada pihak lawan.

Panitera harus berpegang pada tenggang waktu yang ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan permohonan.

- f. Hak jawaban pihak lawan atas permohonan

Termohon mempunyai dua kedudukan yang disesuaikan dengan alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon.

- Berhak untuk mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali, jika permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan yang disebutkan dalam Pasal 67 huruf a atau b. Menghadapi alasan seperti itu pihak lawan dapat aktif mengajukan jawaban sebagai kontra terhadap permohonan.
- Berkedudukan sebagai pihak “agar dapat mengetahui”.

Kedudukan ini bersifat pasif, karena pengiriman salinan surat permohonan peninjauan kembali, tidak menimbulkan hak apa-apa, hanya sebatas agar pihak lawan mengetahui adanya permohonan peninjauan kembali dari pihak pemohon. Kedudukan pasif seperti ini, apabila alasan permohonan peninjauan kembali atas alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf c d e f.

g. Tenggang waktu mengajukan jawaban.

Tenggang waktu mengajukan jawaban adalah 30 hari dari tanggal penerimaan salinan permohonan peninjauan kembali, lewat dari batas tenggang waktu tersebut, maka dianggap tidak mengajukan jawaban, dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan

dengan permohonan peninjauan kembali sudah dapat dikirim ke Mahkamah Agung.

- h. Pengiriman berkas perkara diatur dalam Pasal 72 ayat (3) yang menentukan tiga hal:
- Yang dikirimkan ke Mahkamah Agung ialah berkas perkara secara lengkap,
 - Biaya perkara,
 - Tenggang waktu pengiriman selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah habis tenggang waktu termohon mengajukan jawaban.¹⁰²

4.5. Putusan Peninjauan Kembali

Suatu putusan tidak bisa diterima karena terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tenggang waktu yang telah ditentukan, atau karena: (1) permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak, (2) surat kuasa tidak disertakan, padahal permohonan dikuasakan kepada orang lain, (3) permohonan diajukan kedua kalinya, (4) permohonan dimohonkan terhadap putusan Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), (5) permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal yang telah ditentukan.

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h. 370-371.

Putusan ditolak apabila alasan-alasan peninjauan kembali tidak didukung oleh fakta yang benar yang menjadi alasan dasar permohonan peninjauan kembali, atau alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Putusan dikabulkan apabila alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985. Dalam hal permohonan dikabulkan, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutus sendiri perkara itu.

Apabila Mahkamah Agung telah memberikan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, maka salinan putusan segera dikirim melalui Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut dan panitera berkewajiban untuk memberitahukan bunyi putusan serta mengirimkan turunan salinan putusan kepada para pihak.¹⁰³

4.6. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali adalah hak, oleh sebab itu dapat dicabut setiap selama belum diputus. Akan tetapi sekali dilakukan pencabutan, maka permohonan peninjauan

¹⁰³ Manan, *Penerapan ...*, h. 367-368.

kembali tidak dapat diajukan kembali. Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan seperti pencabutan permohonan kasasi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Arto, *Praktek ...*, h. 310.

BAB III
PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 21/PK/Ag/2013
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN
ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH

A. Gambaran Umum tentang Mahkamah Agung

1. Pembentukan Mahkamah Agung

Pembentukan Mahkamah Agung di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Mahkamah Agung Indonesia dalam sejarahnya merupakan kelanjutan dari “*Het Hoogerechtshof vor Indonesie*” (Mahkamah Agung Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia) yang didirikan pada tahun 1842 yang diubah menjadi *Het Hoogerechtshoof* berkedudukan di Jakarta.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan lembaga *Het Hoogerechtshoof* (Mahkamah Agung) ini tetap dipertahankan dan diberlakukan sebagai lembaga Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menetapkan bahwa, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945”.

Ketua Mahkamah Agung yang pertama pada waktu itu adalah Alm. Mr. Kusumah Atmadja yang diangkat langsung oleh Presiden R.I. Ir. Soekarno bersamaan dengan pengangkatan menteri-menteri kabinet yang pertama pada

bulan September 1945. Pada waktu itu Indonesia belum mempunyai undang-undang tentang Mahkamah Agung. Barulah kemudian pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) dibuat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia, yang merupakan undang-undang Mahkamah Agung yang pertama.

Kemudian pada tahun 1965 dikeluarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum. Namun kemudian, undang-undang tersebut oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1969 dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku. Barulah kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1965 tersebut.

Sementara itu pada tahun 1970 diundangkanlah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi yang membawa

badan-badan peradilan lainnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Kemudian Ketetapan MPR RI No. III/ MPR/ 1978, pada Pasal 1 ayat (2), mengukuhkan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara bersama-sama dengan Lembaga Tinggi Negara lain, yaitu Presiden, DPA, DPR, dan BPK. Selanjutnya Pasal 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengukuhkan pula tentang kedudukan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara, pasal tersebut menetapkan bahwa, “Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/ MPR/ 1978”.

Eksistensi Mahkamah Agung R.I. dan juga mengenai kekuasaan kehakiman sampai pada saat ini terakhir diatur dengan undang-undang, yaitu:

- 1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 yang mengatur tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang –

Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.¹⁰⁵

2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung

Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini ialah:

- a. Tugas dan fungsi mengadili (judisiil), yaitu sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan Pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Tugas dan fungsi *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- c. Tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap peradilan di bawahnya, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan

¹⁰⁵ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 180-182.

dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 2 dan Pasal 39 Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009).

- d. Tugas dan fungsi memberi nasehat dan pertimbangan hukum yaitu Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- e. Tugas dan fungsi administratif, yaitu Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan 21 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, membina dan menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi secara organisatoris, administratif dan finansial.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 183.

3. Kedudukan Mahkamah Agung

Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi”. Hal ini berarti bahwa badan-badan kehakiman selain Mahkamah Agung semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut adalah Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Militer sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI/ABRI atau yang dipersamakan dengan itu;
- b. Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk perkara pidana militer, dan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara sengketa Tata Usaha Angkatan bersenjata;
- c. Pengadilan Militer pertempuran sebagai Pengadilan Tinggi pertama untuk perkara pidana yang dilakukan anggota TNI/ABRI atau yang dipersamakan dengan itu dalam pertempuran;

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Semua Pengadilan dalam semua lingkungan Peradilan tersebut merupakan Pengadilan yang memeriksa duduk perkara (*Judex Factie*) sedang Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Kasasi, kecuali dalam beberapa hal tertentu dimana Mahkamah Agung akan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir, yaitu dalam perkara:

- a. Sengketa yurisdiksi.
- b. Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia.
- c. Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kasasi demi kepentingan hukum.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung dapat memainkan peran judikatifnya, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁷

4. Kewenangan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung termaktub dalam Pasal 20 dan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, meliputi dua hal di antaranya adalah:

- a. Litigasi, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dan semua lingkungan peradilan;
 - 2) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili;
 - 4) Menguji secara materiil terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dalam bidang peradilan, tugas dan kewajiban pokok hakim yaitu mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 203-205.

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰⁸

b. Non litigasi, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
- 2) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara.¹⁰⁹

B. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/Ag/2013 tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Wali Nikah yang Tidak Sah

1. Proses Perkara di Pengadilan Agama

Sebelum masuk pada perkara pembatalan perkawinan, antara suami dan istri atau para pihak ini sebelumnya sedang berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam gugatan perceraian. Istri dalam hal ini mengajukan gugatannya pada

¹⁰⁸ Achmad Arief Budiman, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia”, UIN Walisongo Semarang: Jurnal *al-Ahkam*, Volume 24 Nomor 1, Edisi April 2014, h. 21.

¹⁰⁹ Harahap, *Kekuasaan Mahkamah ...*, h. 116 dan 177.

tanggal 15 September 2009 dengan Kuasa Hukumnya. Kemudian pada tanggal 18 November 2009 suami dengan Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi. Sebenarnya permasalahan yang penulis teliti merupakan permasalahan yang kompleks, dimana adanya perkara perceraian dan pembatalan perkawinan pula. Karna kajian yang penulis teliti adalah mengenai pembatalan perkawinan, maka fokus pembahasan penelitian ini hanya pada permasalahan pembatalan perkawinan saja, bukan pada perceraian. Perkara perceraian hanyalah menjadi adanya fakta atau bukti lain bahwa telah ada gugatan perceraian. Di bawah ini akan penulis paparkan mengenai perkara pembatalan perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, Pemohon: M. Rusdy Thahir, SH. Bin KH. M. Thahir Rahim, Lahir di Watampone 3 Maret 1949, Agama Islam, beralamat di Jln. Dahlia Raya Blok I No. 2 Rt. 003/ Rw. 036 Perumahan Kemang Pratama, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi yang memberikan Kuasa kepada: Yusri H. Palammai, SH. & Rekan, beralamat di Jln. Utan Kayu Raya No. 88 C Jakarta Timur. Melawan Termohon: 1) Deby Gustiani, beralamt di Jln. Kembang I Rt. 002/ Rw. 001 Kwitang Senen Jakarta Pusat yang memberikan Kuasa kepada Eva L. Rahman, SH.

dan Thris Syah Putra Lubis, SH. sebagai Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Eva L. Rahman, SH. & Rekan, beralamat di Jln. Persahabatan No. 65 Rt. 10/ Rw. 08 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Cikeas, Jakarta Timur. 2) Arman Jumain, beralamat di Jln. Kembang I Rt. 002/ Rw. 001 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. Serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Turut Termohon.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2009, telah mengajukan permohonan dengan dalil perkaranya sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 antara Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan di Perumahan Kemang Pratama II Jln. Dahlia Raya Blok No. 2 Bekasi dihadapan Penghulu Kantor Urusan Agama Bekasi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008. Bahwa dalam perkawinan tersebut berjalan kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan tidak dikarunia anak.

Bahwa Termohon I telah memberikan keterangan palsu dihadapan Pejabat Kelurahan Kwitang, Kecamatan Kwitang, Jakarta Pusat, ia menyatakan bahwa ayah kandung Termohon I adalah Hamim, padahal Hamim bukanlah ayah kandung Termohon I, bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Termohon I, hal ini dikuatkan oleh saksi Nur Kholis,

S.Ag. yang pada saat perkawinan bertindak sebagai penghulu. Bahwa perbuatan Termohon I termasuk pelanggaran hukum tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu dihadapan pejabat publik.

Pemohon sebagai orang yang dibesarkan dalam nilai-nilai Islam menyadari bahwa sesungguhnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam, karena wali nikah dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan. Wali nikah tersebut adalah paman dari Termohon I yaitu adik kandung dari Ibu kandung Termohon I yaitu Arman Jumain (Termohon II). Sebagaimana urutan wali nikah terdiri atas 4 (empat) kelompok dari urutan garis lurus ke atas, diatur dalam Pasal 19-21¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga Pemohon menyadari perlu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan demi menghindari dosa dan laknat Allah SWT. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon

¹¹⁰ Pasal 19-21 Kompilasi Hukum Islam, merupakan pasal mengenai wali nikah. Urutan wali tersebut terdiri atas empat kelompok urutan wali. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

dengan Termohon I tidak memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan, maka secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I tidak sah dan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 25¹¹¹-26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dapat dibatalkan maka sebagai akibat hukum yang timbul, mahar perkawinan berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jln. Dr. Ratulangi Kompleks PDAM No. 3 B Kel./Desa Mangkura Sertifikat hak milik (SHM) No. 370 Gambar Situasi (GS) Surat ukur No. 387 tahun 1975 Makassar atas nama Pemohon, adalah batal demi hukum atau mahar menjadi gugur. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar Termohon I menyerahkan kembali mahar tersebut kepada Pemohon, karena Sertifikat dan Surat-surat aslinya sekarang berada di tangan Termohon I.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus:

¹¹¹ Pasal 25: Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

I. Dalam provisi¹¹²:

Menerima permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon untuk pelaksanaan putusan seketika atau terlebih dahulu, walaupun ada Banding atau Kasasi dari Termohon I.

II. Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tidak sah atau batal demi hukum, atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya karena rukun dan syarat sah perkawinan tidak terpenuhi dari calon mempelai wanita/ Termohon I;
3. Memerintahkan kepada turut Termohon yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, untuk menghapus dalam register perkawinan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008, antara Pemohon dengan Termohon I karena perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum;

¹¹² Provisi adalah gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. (Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 86.)

4. Menyatakan mahar berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jln. Dr. Ratulangi Kompleks PDAM No. 3 B Kel./Desa Mangkura Sertifikat hak milik (SHM) No. 370/ Gambar Situasi (GS) Surat ukur No. 387 tahun 1975 Makassar atas nama Pemohon M. Rusydi Thahir, SH. yang disebutkan dalam Akta Nikah No. 712.02/VIII/2008 tertanggal 2 Agustus 2008 harus diserahkan kembali kepada Pemohon, karena perkawinan tersebut tidak sah secara hukum Islam dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sebelum proses hukum dilanjutkan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak yang berperkara untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban Termohon I secara tertulis.

Dalam eksepsi¹¹³, bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil dan formil karena tidak mencantumkan identitas secara lengkap pada Termohon II dan Turut Termohon. Bahwa permohonan Pemohon

¹¹³ Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. (*Ibid.*, h. 85.)

membingungkan, *obscur libel*¹¹⁴, tidak jelas dan kabur, karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, maka mohon Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya permohonan tidak dapat diterima. Bahwa Pemohon menyebutkan adanya keterangan saksi Nur Kholis, S.Ag. sebagai Pejabat KUA Rawalumbu, sedangkan KUA Rawalumbu sendiri sebagai Turut Termohon, bagaimana bisa Turut Termohon juga kedudukannya sebagai saksi. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP, tanggal 15 Februari 2010 dan perkara ini termasuk *nebis in idem*¹¹⁵. Bahwa karena perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon I sudah diputus, maka mohon Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Dalam pokok perkara Termohon I memberikan jawabannya, bahwa Termohon menolak keras dalil Pemohon dalam hal Termohon I memberikan keterangan palsu, karena tidak relevan untuk dicantumkan dalam perkara ini. Bahwa Termohon I mengakui adanya mahar yang disebutkan

¹¹⁴ *Obscur libel* yaitu surat gugatan kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan satu sama lain tidak saling mendukung. (Arto, *Praktek ...*, h. 102.)

¹¹⁵ *Nebis in Idem* adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh Pengadilan yang sama. (Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 90.)

Pemohon. Termohon I menolak mengenai gugurnya mahar dan mahar harus diserahkan kembali kepada Pemohon, yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 30¹¹⁶ dan 32¹¹⁷ Kompilasi Hukum Islam. Bahwa seorang suami yang telah menggauli isterinya, maka si isteri tidak dapat meminta ganti untuk mengganti tubuhnya yang telah digauli, sebaliknya dengan mahar yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali oleh suaminya. Bahwa Pemohon mempunyai itikad tidak baik karena ingin menarik maharnya kembali.

Berdasarkan jawaban Termohon I di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan:

I. Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. Dalam provisi

- Menolak permohonan provisi Pemohon;
- Menolak permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon untuk seluruhnya.

III. Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

¹¹⁶ Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

¹¹⁷ Pasal 32: Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

2. Menyatakan perkara permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon tidak dilanjutkan karena telah adanya keputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP, mengenai perceraian antara Pemohon dengan Termohon I;
3. Menyatakan mahar yang telah diberikan kepada Termohon I tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dihapus;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Turut Termohon memberikan jawabannya secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut.

Bahwa Turut Termohon membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dengan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Turut Termohon. Bahwa mengenai sebelum pelaksanaan pernikahan harus melengkapi persyaratan dan data-data terkait calon mempelai wanita pada Form N.1 s/d N.4¹¹⁸ yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, ada beberapa data yang dicoret atas persetujuan Arman setelah akad nikah dilaksanakan. Apa pun yang terjadi persyaratan

¹¹⁸ N.1: berisi surat keterangan nikah, status mempelai; N.2: berisi tentang surat-surat keterangan asal-usul mempelai; N.3 : berisi tentang persetujuan dari kedua calon mempelai; N.4: berisi tentang surat keterangan dari orang tua.

pada saat itu sudah dilengkapi atau memenuhi syarat. Bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan jika ternyata keterangan Pemohon benar mengenai Tergugat I telah memberikan keterangan palsu, untuk masalah ini kami serahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk mencari fakta-fakta tersebut. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan, di antaranya apabila salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27¹¹⁹ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Keterangan lain juga didapat dari Nur Kholis, S.Ag. sebagai Pegawai Pencatat Nikah ketika perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dilaksanakan, yang pada pokoknya:

- Bahwa ketika dipanggil nama dari wali Termohon I sebagaimana yang tertera di dalam Form NC, namun di antara yang hadir ada yang mengangkat tangan dan maju mengaku sebagai Bapak kandung Termohon I di depan penghulu, saksi dan tamu undangan. Ternyata Hamim tidak hadir sehingga pada saat pelaksanaan pernikahan

¹¹⁹ Pasal 27: (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

yang menjadi wali nikah dari Termohon I adalah Arman Jumain (Termohon II);

- Bahwa setelah ditelusuri tentang kebenaran dari wali Termohon I, berdasarkan keterangan dari keluarga Hamim bahwa Termohon I pernah tinggal di rumah Hamim pada saat Arman Jumain masih menjadi menantunya, karena saat ini Arman Jumain sudah bercerai dengan puterinya Hamim. Sehingga antara Termohon I dengan Hamim tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan kekeluargaan.

Begitu juga jawab menjawab replik¹²⁰ dari Pemohon dilakukan secara tertulis yang isinya tetap berpegang teguh pada permohonan Pemohon. Dalam eksepsi, terkait pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP tertanggal 15 Februari 2010 antara Deby Gustiani (Penggugat) dan M. Rusdy Thahir, SH. (Tergugat), dan pada tanggal 24 Februari 2010 Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Selanjutnya mengajukan memori banding, karena pihak Tergugat masih mengajukan Banding maka perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹²⁰ Replik adalah tanggapan Penggugat/Pemohon atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat/Termohon. (R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 43.)

Kemudian atas replik dari Pemohon, Termohon I menyampaikan duplik¹²¹nya secara tertulis yang isinya tetap pada jawaban Termohon I. Dalam eksepsi, bahwa Pemohon mengakui adanya banding di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga perkara perceraian antara Termohon I dengan Pemohon sedang diperiksa, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan ini. Dalam pokok perkara, bahwa faktanya di dalam Akta Nikah tercantum nama Termohon I dan Pemohon dan perkara perceraian telah diperiksa dan diputus, yang pada saat sidang perkara perceraian Pejabat Kantor Urusan Agama yang bernama Nur Kholis, S.Ag. telah menjadi saksi dan telah diperiksa, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa perkawinan antara Deby Gustiani dengan M. Rusydi Thahir adalah sah.

Untuk menguatkan dalil eksepsi Termohon I, ia mengajukan bukti berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP, tertanggal 15 Februari 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berkaitan dengan eksepsi Termohon I yang meminta perkara untuk dihentikan dengan

¹²¹ Duplik adalah jawaban Tergugat/Termohon atas replik yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon. (*Ibid.*)

alasan perkara *a quo*¹²² yang telah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela¹²³ Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 9 Juni 2010, yang amarnya berbunyi:

1. Menolak eksepsi Termohon I untuk menghentikan proses pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo*;
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut untuk memperkuat dalilnya:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/02/VIII/2009, atas nama Pemohon dan Termohon I, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Fotocopy Pemberitahuan dan Registrasi perkara banding atas nama Pemohon, tertanggal 27 Maret 2010, bermaterai cukup;

¹²² *A quo*: bersangkutan atau penunjukkan kepada keputusan yang dimintakan banding atau kasasi. (S. Adiwinata, *Istilah Hukum: Latin-Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986, h. 16.)

¹²³ Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. (Rasyid, *Hukum Acara Perdata ...*, h. 118.)

3. Fotocopy Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Februari 2010, bermaterai cukup;
4. Fotocopy memori banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, bermaterai cukup;
5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tertanggal 15 Februari 2010 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai cukup;
6. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, tertanggal 16 Juni 2010;
7. Fotocopy Akta tentang data perkawinan, Model N, bermaterai cukup;
8. Fotocopy lembaran pengumuman Kehendak Nikah, Model NC, bermaterai cukup;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275050303490005 atas nama Pemohon, Catatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 16 Juni 2010 bermaterai cukup;
10. Saksi-saksi: Thamrin Wahid bin Abdul Wahid (bekerja pada Pemohon), Sulaeman bin Marsudi (sopir Pemohon), Hodijah binti Ahmad Rohim (hubungan saudara dengan Ibu Pemohon), dan Nur Kholis, S.Ag. bin H. Abdurrahman, BA. (penghulu saat perkawinan para pihak).

Sebelum menjatuhkan putusan, upaya mediasi dilakukan oleh hakim yang ditunjuk agar perkara diselesaikan secara damai, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon II tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan dengan alasan-alasan di atas, maka Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, Majelis Hakim telah memutuskan dalam putusan sela Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 9 Juni 2010 yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon I yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur, dan mengenai hal ini sudah menyinggung pada pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Begitu juga halnya dalam provisi, yang menyatakan bahwa petitum tidak didukung oleh posita yang mana hal ini sudah menyangkut dalam pokok perkara maka permohonan provisi tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1070/K/SIP/1973 bahwa tuntutan provisi yang mengenai perkara (*bodem geshil*) tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menimbang bahwa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan provisi,

dianggap telah termasuk dalam pokok perkara. Menimbang dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang terdapat di dalam posita¹²⁴ dan petitum¹²⁵, begitupun replik Pemohon sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Majelis Hakim juga menimbang pada jawaban dan duplik Termohon I di atas. Hakim pun menimbang atas jawaban dan keterangan dari Turut Termohon.

Dengan memperhatikan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan berkaitan dengan apa yang disebut, yaitu tentang wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon I yang diterbitkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi serta mahar dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur tentang pembatalan perkawinan karena persyaratannya yang tidak sempurna, pasal tersebut menerangkan:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah

¹²⁴ Posita atau *fundamentum petendi* adalah dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan alasan dari suatu tuntutan dari pihak Penggugat/Pemohon. (Sarwono, *Hukum ...*, h. 54.)

¹²⁵ Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. (Soeroso, *Praktik ...*, h. 28.)

yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Majelis Hakim juga menimbang berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, yaitu:

- 1) Bukti P.1 berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008, atas nama M. Rusdy Thahir, SH. dengan Deby Gustiani, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon I telah melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kota Bekasi;
- 2) Bukti P.8 berupa Form Pengumuman Kehendak Nikah, menunjukkan Termohon I telah menyampaikan kelengkapan administrasi pernikahan berupa Form N.1 s/d N.4 tertulis nama Bapak calon pengantin perempuan adalah Hamim dihubungkan dengan keterangan H. Nur Kholis, S.Ag. sebagai Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut yang pada saat itu sebagai petugas dalam pernikahan Pemohon dan Termohon I, bahwa ketika saksi memanggil nama Hamim dari wali Termohon I sebagaimana yang tertera dalam lembaran

Form NC namun di antara yang hadir ada yang mengangkat tangan dan maju mengaku Arman Jumain dan mengaku sebagai Bapak kandung Termohon I, ternyata yang bernama Hamim tidak hadir sehingga pada saat pelaksanaan perkawinan yang menjadi wali nikah dari Termohon I adalah Termohon II (Arman Jumain). Selanjutnya dicatat dalam Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- 3) Berdasarkan keterangan saksi H. Nur Kholis, S.Ag. sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, setelah ia menelusuri tentang kebenaran wali Termohon I ternyata berdasarkan keterangan dari keluarga Hamim bahwa Termohon I pernah tinggal di rumah Hamim pada saat Arman Jumain masih sebagai menantunya karena saat ini Arman Jumain sudah bercerai dari puterinya Hamim, sehingga ternyata antara Termohon I dengan Hamim adalah orang lain dengan kata lain tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan kekeluargaan antara Termohon I dengan Hamim;
- 4) Menurut keterangan saksi Thamrin Wahid bin Abdul Wahid dan Hodijah binti Ahmad Rohim, dimana saksi adalah orang yang berasal dari Makassar bahwa saksi tahu Arman Jumain bukan ayah kandung dari Termohon I, tetapi hanya sebagai adik kandung dari Ibu kandung

Termohon yang bernama Darsinah, yang mana saksi sendiri sudah lama mengenalnya dan hingga kini Bapak kandung Termohon I tidak diketahui;

- 5) Bersangkutan dengan bukti P.1 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi Hodijah binti Ahmad Rohim pada saat pelaksanaan akad nikah disebutkan pula maharnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan permohonan Pemohon karena yang menjadi wali nikah dalam perkawinannya adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon I yaitu Termohon II, sedangkan dalam jawaban dan duplik Termohon I tidak menanggapinya, oleh karenanya dianggap mengakui dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Thamrin Wahid bin Abdul Wahid dan Hodijah binti Ahmad Rohim yang menerangkan tentang keberadaan Arman Jumain adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon I, sehingga posita Pemohon telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan di depan Pejabat Pencatat Nikah dan menurut Turut Termohon pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I sudah memenuhi persyaratan saat itu, akan tetapi penghulu telah tidak cermat mengenai wali nikah, sebab penghulu yang bertugas pada saat itu hanya

percaya pada keterangan Termohon II. Petugas mengetahui adanya ketidakcocokan dengan data pada Form N.1 s/d N.4 tertulis nama Bapak calon pengantin adalah Hamim, setelah ditelusuri Hamim pun tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan keluarga dengan Termohon I. Oleh karena itu atas jawaban dari Turut Termohon, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I sudah memenuhi persyaratan saat itu adalah tidak benar, justru tidak ada kecocokan dengan data yang masuk berkenaan nama wali nikah dengan peristiwa pernikahan yang pada saat itu dilaksanakan dengan wali nikah yang berbeda dengan data Form N.1 s/d N.4, namun perkawinan tetap dilaksanakan hingga diterbitkannya Akta Nikah, hal ini akan berakibat fatal pada keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon I.

Menimbang, bahwa pada dasarnya wanita hanya boleh dinikahkan pertama-tama oleh wali nasabnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila wali nasab tidak ada atau adhol maka boleh dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, sesuai pula dengan pendapat ahli Fiqh:

Artinya : *“Yang berhak menjadi wali ialah ayah sampai dengan urutan ke atas kemudian paman sekandung, paman sebakap kemudian anak laki-laki mereka masing-masing”* Al-Bajuri II : (hal. 132-133).

Majelis Hakim berpendapat hal yang esensial dalam suatu perkawinan adalah keberadaan wali, sehingga

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang menggunakan wali nikah dengan Termohon II yaitu adik kandung dari Ibu kandung Termohon I, maka secara materil telah tidak terpenuhinya syarat wali nikah karena tidak menggunakan wali nasab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula menggunakan wali hakim. Oleh karenanya, dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak mengikuti ketentuan pada Pasal 20 s/d 23¹²⁶ Kompilasi Hukum Islam. Selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon I menggunakan wali nikah yang tidak berhak, merupakan salah satu unsur sebagaimana Pasal 71¹²⁷ KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 petitum Pemohon pada butir 2 patut untuk dikabulkan.

¹²⁶ Pasal 20 sampai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam membahas tentang wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali nasab dan penggunaan wali hakim.

¹²⁷ Pasal 71: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: (a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud; (c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; (d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; (f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tertanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, yang telah diakui oleh Termohon I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan dimana setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Turut Termohon, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Prof. V.d Pot oleh R. Atang dalam bukunya HTUN 1989 : 24, yang menyatakan bahwa “..*syarat sahnya suatu penetapan ada 4 di antaranya: Tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan,..*” sehingga berdasarkan pendapat doktrin tersebut, Akta yang dikeluarkan Turut Termohon adalah tidak sah karena adanya unsur kekeliruan baik disengaja ataupun tidak. Secara formal, Akta Nikah merupakan sebuah Akta Autentik.

Begitupun pendapat para pakar hukum bahwa akta autentik¹²⁸ mempunyai kekuatan bukti menurut hukum sepanjang tidak ditemukannya cacat hukum dalam akta

¹²⁸ Akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu. (M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 42.)

tersebut, sedangkan dalam Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I telah ditemukannya cacat hukum, oleh karenanya patut dinyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tertanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai batalnya perkawinan Pemohon dengan Termohon I, maka patut dicatat dalam buku Register sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa mengenai mahar dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun pernikahan yang merupakan kewajiban calon suami sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, namun karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak memenuhi ketentuan syariat Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka berpengaruh pula terhadap mahar dari perkawinan tersebut. Berkenaan dengan masalah mahar, Majelis Hakim mengetengahkan hadits Nabi Muhammad SAW termaktub dalam Kitab Taisirul Wushul Jilid 4 halaman 317, yang artinya : *Dari Aisyah ra. Ia berkata : Rasulullah SAW. bersabda “Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya itu batal dan kalau telah*

campur maka mas kawinnya bagi perempuan itu, sebab ia telah menghalalkan farajnya, dan apabila wali-wali itu bertentangan maka Sulthanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. (Abu Daud dan Tirmidzi)”. Demikian juga pendapat ahli Fiqh Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu Juz 7 halaman 63 menyatakan yang artinya: “...Apabila dalam perkawinan yang cacat hukum sudah terjadi hubungan kelamin meski hukumnya haram, merupakan perbuatan maksiat dan harus dibatalkan, maka harus diberlakukan sebagian ketentuan-ketentuan hukumnya, yakni bagi wanita dalam perkawinan yang demikian harus mendapatkan bagian minimal dari mahar yang diucapkan atau dari mahar mitsil...”.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah diucapkan maharnya, sedangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah mahar yang tercantum berupa seperangkat alat sholat, al-Qur'an dan sebidang tanah/ tempat tinggal, sehingga tidak secara jelas pencatuman mengenai tanah/ tempat tinggal tersebut dan disisi lain sebagaimana pengakuan Pemohon dengan Termohon I maharnya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Dr. Ratulangi Kompleks PDAM No. 3 B Kel./Desa Mangkura Sertifikat hak milik (SHM) No. 370 Gambar Situasi (GS) Surat ukur No. 387 tahun 1975 Makassar

atas nama Pemohon, sehingga Majelis menilai bahwa secara *de Yure* (hukum) mahar tersebut ternyata belum dialihkan kepada Termohon I, sehingga petitum Pemohon butir 4 sebagai tuntutan yang tidak jelas, oleh karenanya petitum angka 4 permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima.

Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusan akhirnya Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, pada tanggal 18 Agustus 2010 dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, mengadili:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Pemohon;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan batal perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008;
3. Menyatakan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Memerintahkan Turut Termohon/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk mencatat Akta Perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 1.186.000,-.¹²⁹

2. Proses Perkara di Pengadilan Tinggi Agama

Atas ketidakpuasan Termohon I terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi maka ia mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2010. Berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30 Agustus 2010 Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, yang semula Termohon I menjadi Pembanding melalui Kuasanya melawan Terbanding yang semula Pemohon melalui Kuasanya, dan Arman Jumain yang semula Termohon II sekarang Turut Terbanding I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi semula Turut Terbanding, sekarang Turut Terbanding II. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur.

¹²⁹ Salinan Putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. (Lihat lampiran)

Pada tanggal 12 Oktober 2010 Pembanding telah menyerahkan memori banding, yang kemudian diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2010 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 6 Desember 2010, yang kemudian diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 8 Desember 2010. Pembanding dan Terbanding pun telah melakukan inzage.

Berdasarkan tata cara permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Dalam provisi dan eksepsi, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam hal provisi dan eksepsi dapat pula dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding karena pertimbangan dan putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding perlu mempertimbangkan mengenai persyaratan formal dari permohonan Pemohon/Terbanding sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding didasarkan atas alasan bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/Pembanding yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu dengan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008, ternyata dilaksanakan dengan menggunakan

wali nikah yang tidak berhak, yaitu adik kandung dari Ibu kandung Termohon I/Pembanding yang bernama Arman Jumain. Berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah dan pengakuan Turut Termohon II telah terbukti bahwa benar perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon I/Pembanding dilakukan dengan wali nikah bernama Arman Jumain serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding, terbukti bahwa Arman Jumain adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon I/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotocopy salinan putusan perkara perceraian Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP telah terbukti bahwa setelah akad nikah Pemohon/Terbanding dan Termohon I/Pembanding telah hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 9 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tersebut di atas, maka hak untuk mengajukan pembatalan nikah oleh suami menjadi gugur, dan seharusnya diperbaharui supaya sah. Bahwa karena hak untuk mengajukan pembatalan nikah telah gugur maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian pula dengan tuntutan Pemohon/Terbanding pada petitum butir 3 dan 4 juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah mengabulkan permohonan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dalam sidang terbuka dan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Dalam amar putusannya Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, pada tanggal 25 Januari 2011 menyatakan bahwa menerima permohonan banding dari Termohon I/Pembanding. Bahwa dalam provisi dan eksepsi menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. Sedangkan dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks, dan mengadili sendiri:

1. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.186.000,- dan membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,-.¹³⁰

¹³⁰ Salinan Putusan Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. (Lihat lampiran)

3. Proses Perkara Kasasi

Setelah putusan Banding diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2011, kemudian oleh Pemohon/Terbanding dengan Kuasanya mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2011 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Maret 2011. Pihak yang berperkara dalam tingkat Kasasi, M. Rusdy Thahir, SH. bin KH. Thahir Rahim sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding melalui Kuasa hukumnya melawan Deby Gustiani sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon I/Pembanding dengan Kuasa hukumnya. Serta para Turut Termohon Arman Jumain dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu.

Pada tanggal 2 Mei 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding, yang kemudian jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Mei 2011.

Bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan kasasi

tersebut dapat diterima. Berikut ini alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi, yang pokoknya ialah:

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara yang terdapat dalam putusan;
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding tidak cermat dan kurang teliti dalam memeriksa bukti-bukti surat khususnya bukti yang mengenai kehendak nikah, di dalam From N.1 s/d N.4 tercatat data kedua calon mempelai, termasuk data Bapak kandung dari calon mempelai wanita yang akan menjadi wali nikah. Wali nikah dari Termohon Kasasi yang termuat adalah Hamim. Sedangkan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Arman Jumain, padahal Arman Jumain adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon Kasasi, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi pada tingkat Pertama, yaitu Thamrin Wahid bin Abdul Wahid, Sulaeman bin Marsudi, dan Hodijah binti Ahmad Rohim pada tingkat Pertama;
3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan bahwa hak suami untuk mengajukan pembatalan nikah itu gugur dan seharusnya perkawinan itu diperbaharui, hal ini kami tidak sependapat, karena selama kurun waktu 9 (sembilan)

bulan, Pemohon Kasasi sendiri tidak menghendaki untuk melakukan nikah ulang, karena selama kurun waktu 9 (sembilan) bulan Termohon Kasasi sudah 3 kali meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dan akhirnya Pemohon Kasasi sudah tidak tahan dengan sikap Termohon Kasasi. Setelah mendapatkan seluk beluk Termohon Kasasi, guna untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, ternyata Termohon Kasasi sudah lebih dahulu mengajukan gugatan perceraian, selang beberapa hari kemudian kami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena menurut kami yang lebih tepat dalam perkara *a quo* ini adalah pembatalan perkawinan bukan perceraian;

4. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim tingkat Banding menyatakan untuk diperbaharui kembali perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, pertimbangan tersebut sangat keliru, karena Pemohon Kasasi sudah tidak ingin melanjutkan lagi perkawinannya dengan Termohon Kasasi yang telah banyak melakukan kebohongan terhadap Pemohon Kasasi. Belum lagi baru hitungan bulan saja sudah beberapa barang mewah yang diminta oleh Termohon Kasasi, yang tujuannya bukan untuk membina rumah tangga yang sakinah, melainkan untuk mendapatkan materi semata;

5. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang membatalkan perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sangat tepat dan benar dengan landasan hukum yang tepat serta argumentasi yang rasional dan realistis;
6. Bahwa pertimbangan Hakim pada tingkat Banding yang menyatakan perkawinan harus diperbaharui adalah pertimbangan yang dipaksakan, karena seseorang yang sudah mengajukan pembatalan perkawinan berarti orang tersebut tidak menghendaki lagi menjalani rumah tangga dan tidak mau melakukan pembaharuan perkawinan, maka perkawinannya selama itu tidak sah dan tidak bisa dibiarkan terus menerus, maka diperlukan lembaga yang berwenang yang dapat menyatakan perkawinan batal;
7. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, sehingga penerapan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak tepat dan tidak realistis untuk diterapkan dalam perkara ini;
8. Bahwa mengenai mahar rumah dan sebidang tanah yang disebutkan dalam Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008, penyebutan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karena itu tidak bisa dilaksanakan. Jika nantinya perkara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, mahar dari suami

kepada istri tetap wajib yang patokannya adalah ma'ruf (standar kelayakan);

9. Bahwa mengenai sertifikat asli salah satu rumah Pemohon Kasasi yang berada di tangan Termohon Kasasi, yang dibeli oleh Pemohon Kasasi semasa perkawinan dengan istrinya terdahulu, karena Pemohon dan Termohon Kasasi masih berada satu rumah, sehingga dengan mudah Termohon Kasasi mengambil sertifikat tersebut dan dibawa tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi ketika Termohon Kasasi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama.

Berdasarkan alasan-alasan Kasasi tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan 1 s/d 9, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak menghendaki adanya pembaharuan akad nikah, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Kalau tujuan pembaharuan akad, kemudian dipergunakan bukti perceraian adalah perbuatan yang mubadzir. Dan perkawinan keduanya, hukumnya batal sejak semula, bukan suatu perkawinan yang dapat dimintakan pembatalannya.

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 18 Agustus 2010.

Pada tanggal 7 Februari 2012 dari rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, mengeluarkan putusannya Nomor: 573/K/Ag/2011, dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dihadiri oleh para pihak, dengan ini mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 18 Agustus 2010.¹³¹

4. Proses Perkara Peninjauan Kembali

Dengan adanya putusan Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukannya putusan tersebut kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

¹³¹ Salinan Putusan Nomor: 573/K/Ag/2011. (Lihat lampiran)

Kasasi/Termohon I/Pembanding dengan perantaraan Kuasanya telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2012, terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 573/K/Ag/2011, melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon/Terbanding serta para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi.

Menimbang, dengan memperhatikan posita perkara, eksepsi, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tertanggal 18 Agustus 2010, sebagaimana yang telah disebutkan pada proses perkara tingkat pertama. Begitu juga, dengan memperhatikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tertanggal 25 Januari 2011.

Menimbang, dengan memperhatikan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan Mahkamah Agung Nomor: 573/K/Ag/2011 tertanggal 7 Februari 2012, yang isinya menyatakan membatalkan putusan tingkat Banding yang membatalkan putusan tingkat Pertama, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bekasi yang tetap dikuatkan.

Berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi yang disertai dengan memori peninjauan kembali yang

memuat alasan-alasan Peninjauan Kembali, kemudian dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tersebut diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2012. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan, dan diajukan dalam tenggang dengan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan tersebut formal dapat diterima.

Alasan-alasan Peninjauan Kembali yang termuat dalam memori peninjauan kembali, yang pada intinya sebagai berikut.

Pertama, bukti *novum*¹³² berupa Akta Kelahiran 2009/DISP/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 atas nama Deby Gustiani yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menyebutkan Bapak kandung adalah Arman Jamaing dan Ibu kandung adalah Darwati¹³³ dan bukti tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya. Dengan adanya bukti baru *novum* tersebut, maka perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 712.02/VIII/2008

¹³² *Novum*: alasan/peristiwa yang baru dikemukakan atau baru muncul kemudian. (Simorangkir, et al., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 107.)

¹³³ Fotocopy Bukti Novum yang berupa Akta Kelahiran. (Lihat lampiran)

adalah sah dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Bahwa dengan adanya novum tersebut maka putusan Kasasi Nomor: 573/K/Ag/2011 mengenai pembatalan perkawinan harus dibatalkan.

Kedua, adanya kekhilafan hakim Kasasi dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa pembaharuan akad nikah adalah perbuatan yang mubadzir jika tujuannya untuk dipergunakan bukti perceraian, karena Pemohon Kasasi sudah tidak menghendaki pernikahan dengan Termohon Kasasi. Jelas tersirat bahwa keputusan ini adalah keputusan yang mubadzir, yang tidak ada gunanya, sehingga seharusnya permohonan pembatalan perkawinan ini tidak dikabulkan. Bahwa dalam keputusan inilah terdapat kekhilafan hakim, karena seharusnya Majelis Hakim Kasasi mengacu pada perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Jakarta Pusat, bukan mengacu kepada perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sehingga keputusannya adalah tentang perceraian bukan pembatalan nikah.

Bahwa putusan Kasasi tentang pembatalan perkawinan yang mengacu pada putusan Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi adalah

keputusan yang dipaksakan dan tidak disertai dengan bukti yang akurat, hal tersebut dapat diketahui dari fakta persidangan yaitu:

- a. Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan Akta Nikah asli karena Akta tersebut telah berada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan perkara telah diproses dan diputus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- b. Saksi Nur Kholis, S.Ag. pejabat KUA Rawalumbu tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena kedudukannya sebagai Turut Termohon.

Bahwa, karena putusan Kasasi adalah keputusan yang dipaksakan dan tidak disertai bukti yang akurat, sehingga layaknyapun putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hukum Kasasi. Dan seharusnya putusan dalam tingkat Kasasi harus dibatalkan, maka mohon kepada Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Kasasi.

Bahwa dalam pertimbangan hakim yang membenarkan alasan-alasan Kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali adalah pendapat yang keliru karena:

- a. Bukti Form N.1 s/d N.4 yang menyebutkan bapak kandung adalah Hamim, bukan merupakan kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali, karena yang mendaftarkan perkawinan pada saat itu adalah saudara

Termohon Peninjauan Kembali. Kemudian diperbaiki dengan nama Bapak kandung Arman Jumain dan terbitlah Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 (sesuai bukti novum);

- b. Karena yang mengajukan perkawinan adalah Termohon Peninjauan Kembali, sedangkan pembatalan perkawinan diajukan oleh Termohon setelah adanya pengajuan perceraian oleh Pemohon;
- c. Ternyata faktanya pembatalan perkawinan diajukan untuk menarik kembali mahar perkawinan.

Bahwa Termohon mempunyai itikad tidak baik dengan cara memutar-mutar dengan memberikan berbagai alasan supaya menghapuskan mahar perkawinan yang sudah menjadi hak istri, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam. Berkenaan dengan alasan-alasan di atas, mohon Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 573/K/Ag/2011 mengenai pembatalan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Dan mohon Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali mengacu kepada perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama, sehingga putusannya perkawinan adalah karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985¹³⁴ yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata serta kesalahan penerapan hukum dari *judex factie*¹³⁵ dan *judex yuris*¹³⁶, sedangkan bukti baru yang diajukan bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak.

Atas pertimbangan hukum di atas, pada tanggal 21 Juli 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya Nomor 21/PK/Ag/2013 dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dihadiri oleh para pihak, dengan ini mengadili:

¹³⁴ Pasal 67 a s/d f, memuat alasan-alasan yang dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹³⁵ *Judex factie*: Hakim yang memeriksa tentang duduk perkara yang berhubungan langsung dengan fakta-faktanya. (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 199.)

¹³⁶ *Judex yuris*: Hakim yang memeriksa tentang duduk perkara berdasarkan penerapan undang-undang.

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Dan membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,-.¹³⁷

MATRIKULASI PUTUSAN-PUTUSAN

PUTUSAN	AMAR PUTUSAN	DASAR PERTIMBANGAN HUKUM
Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks (Masuk tanggal 18 November 2009, diputus tanggal 18 Agustus 2010).	Mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan pernikahan Pemohon (suami) dengan Termohon I (isteri) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008, Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008.	Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg (Masuk tanggal 30 Agustus 2010,	Menerima permohonan banding dari Pembanding (isteri) dengan membatalkan putusan Pengadilan	Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan, “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama

¹³⁷ Salinan Putusan Nomor: 21/PK/Ag/2013. (Lihat lampiran)

<p>diputus tanggal 25 Januari 2011).</p>	<p>Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/ PA.Bks, yang membatalkan pernikahan Pemohon (suami) dengan Termohon I (isteri) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008, Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008.</p>	<p>sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.</p>
<p>Putusan Kasasi Nomor: 573/K/Ag/2011 (Masuk tanggal 14 Maret 2011, diputus tanggal 7 Februari 2012).</p>	<p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/P TA.Bdg tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/ PA.Bks tanggal</p>	<p>Alasan kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan hukum, bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak menghendaki adanya pembaharuan akad nikah, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan putusan Pengadilan Agama Bekasi telah tepat dalam halnya membatalkan pernikahan Pemohon (suami) dengan Termohon I (isteri) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008, Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008.</p>

	18 Agustus 2010.	
Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013 (Masuk tanggal 2 Oktober 2012, diputus tanggal 21 Juli 2014).	Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan kesimpulan hukum putusan yang dilaksanakan adalah tetap pada putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks.	Alasan yang diajukan untuk permohonan peninjauan kembali adalah tidak termasuk salah satu alasan yang di maksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985. Bukti adanya novum sebagai alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali merupakan bukti yang bukan bersifat menentukan dan tidak terdapat kekeliruan hakim dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dari <i>judex factie</i> dan <i>judex juris</i> .
Adanya perceraian yang dijadikan sebagai bukti pada peradilan tingkat pertama dengan Putusan Nomor: 646/Pdt.G/2009/P.A.JP (Masuk tanggal 15 September 2009, diputus tanggal 15 Februari 2010).		

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR
21/PK/Ag/2013 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
DENGAN ALASAN WALI NIKAH YANG TIDAK SAH**

**A. Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pk/Ag/ 2103
tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Wali Nikah
yang Tidak Sah**

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama

Putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tertanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan putusannya dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon (suami) dengan Termohon I (istri) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2008 dengan kutipan akta Nomor: 712.02/VIII/2008 dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian terkait dengan putusan pembatalan perkawinan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menyatakan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Memerintahkan kepala KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk mencatat Akta Perkawinan Pemohon dengan Termohon I dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut penulis, Majelis Hakim tingkat pertama dengan berbagai pertimbangan hukum telah menyinggung ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan permasalahan wali nikah yang tidak sah dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon I karena persyaratannya yang tidak sempurna, akan tetapi pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim menyebutkan “Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon I menggunakan wali nikah yang tidak berhak, merupakan salah satu unsur sebagaimana Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 petitum Pemohon pada butir 2 patut untuk dikabulkan”. Pasal tersebut menyebutkan “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan pada ayat (2) Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana pasal tersebut menerangkan

“Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.

Mengenai wali nikah, dalam pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim, telah selaras dengan dasar hukum yang digunakan dan juga mempertimbangkan berdasarkan bukti dan keterangan saksi saat persidangan. Ketiga saksi yaitu Thamrin Wahid bin Abdul Wahid, Sulaeman bin Marsudi dan Hodijah binti Ahmad Rohim dalam keterangannya yang menerangkan tentang keberadaan Arman Jumain adalah adik kandung dari Ibu kandung Termohon I. Sebagaimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya bersandarkan pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan wali nikah merupakan pendapat yang telah tepat dan sesuai.

Ketentuan wali nikah telah secara jelas diuraikan penulis di dalam uraian bab sebelumnya, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks perkara pembatalan perkawinan, adanya wali nikah yang tidak sah menjadikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I menjadi tidak sah/batal atau dapat dimintakan pembatalannya. Ketentuan ini

berdasarkan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam, “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Dalam hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ". (رواه الترمذي)^{١٣٨}

Artinya: *Telah menceritakan 'Ali bin Hujr. Memberitahukan Syarik bin Abdillah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Qutaibah. Memberitahukan Abu 'Awanah dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Bundarun. Telah menceritakan Abdurrahman bin Mahdi dari Isroil, dari Abi Ishaq. Dan telah menceritakan Abdullah bin Abi Ziyad. Memberitahukan Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Musa berkata: "Rasulullah SAW bersabda 'Tidak*

¹³⁸ al-Mubarakafuri, *Tuhfat ...*, h. 191.

ada nikah melainkan dengan wali'.". (HR. Tirmidzi)¹³⁹

Karena adanya pelanggaran saat proses perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I sedang berlangsung, yaitu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari Ibu kandung mempelai wanita (Termohon I). Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 21 mengenai urutan wali nikah telah disebutkan:

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Sehingga, dalam hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi menjadi gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena adanya cacat hukum, yang mana syarat-syarat dalam melakukan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, adanya keteledoran dari pihak KUA dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa terlihat jelas kelalaian petugas

¹³⁹ ash-Shiddieqy, *Koleksi ...*, h. 25.

KUA dalam memberikan kelonggaran persyaratan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Petugas KUA harusnya selektif untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Bukan hanya sekedar meneliti berkas-berkas yang masuk saja tetapi juga harus aktif untuk bertanya kepada calon pasangan suami isteri yang dalam perkara ini adalah Pemohon (suami) dengan Termohon I (istri). Keaslian berkas juga merupakan syarat penting bagi KUA untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Tugas dan fungsi KUA termaktub dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁰

Atas keteledoran Pejabat KUA dalam hal pencatatan perkawinan, sehingga menimbulkan pelanggaran dalam melaksanakan perkawinan yaitu data-data yang diperoleh adalah keterangan palsu dari calon mempelai wanita, berakibat hukum bagi Pejabat KUA yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 untuk mencatat kembali akta tersebut dalam registernya sebagai akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Pembanding (Termohon I) melalui kuasa hukumnya merasa tidak puas terhadap putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks dan telah mengajukan permohonan banding, kemudian permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (Pemohon) melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Oktober 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tertanggal 1 Desember 2010 dan Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2010, yang kemudian diberitahukan

¹⁴⁰ Nuhriison M. Nuh, et. al., *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, h. 33-34.

kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tertanggal 8 Desember 2010. Pembanding dan Terbanding pun telah melakukan inzage.

Putusan dalam upaya hukum banding yang dilakukan oleh Pembanding melawan Terbanding yaitu putusan Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tertanggal 25 Januari 2011 menyatakan tidak dapat menerima pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang telah diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan begitu amar putusan ini membatalkan putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tertanggal 18 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi.

Menurut penulis, putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan berbagai pertimbangan hukumnya merupakan putusan yang tepat dan sesuai. Sebagaimana Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, Majelis Hakim tingkat pertama bersandarkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai persyaratan formal dari

permohonan Pemohon/Terbanding sehubungan dengan ketentuan Pasal 26 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Jika diperhatikan secara seksama kedua ayat dari pasal tersebut bahwa dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I telah gugur haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Akta Perkawinan yang tidak berwenang dan diharuskan untuk memperbaharui perkawinan agar hukum perkawinannya sah.

Selain itu, penulis juga menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan bukti menyatakan Pemohon/Terbanding dan Termohon I/Pembanding telah hidup bersama sebagai suami istri selama ± 9 bulan. Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor

1 Tahun 1974, sebagaimana tersebut di atas, pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pembatalan perkawinan. Jika kita melihat lanjutan dari Pasal 26 yaitu Pasal 27 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, maka jelas terlihat mengenai batasan waktu yang dapat dijadikan sebagai acuan permohonan pembatalan perkawinan. Bunyi pasal tersebut:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam pasal di atas terkait dengan salah sangka pada diri suami atau isteri, mengenai jangka waktu yang dapat diajukan dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terdapat pada ayat (3), telah jelas bahwa apabila yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya dengan jangka waktu enam bulan masih hidup bersama maka gugur

haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Dan kembali lagi kepada Pasal 26 ayat (2), apabila haknya telah gugur dalam mengajukan pembatalan perkawinan maka perkawinan harus diperbaharui supaya hukumnya sah.

Dari kedua putusan tersebut, yaitu putusan tingkat pertama Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks dan putusan tingkat banding Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, penulis lebih cenderung sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, karena putusan yang dijatuhkan telah tepat dan benar dengan berbagai pertimbangan hukumnya. Walaupun menurut penulis terdapat aturan hukum lagi yang dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding.

3. Analisis Putusan Kasasi

Selanjutnya, putusan Banding diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 3 Maret 2011, kemudian oleh Pemohon/Terbanding dengan Kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2011. Pemohon Kasasi telah menyerahkan memori kasasi tertanggal 21 Maret 2011 dan telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi tentang memori kasasi pada tanggal 2 Mei 2011, kemudian Termohon Kasasi telah pula menyerahkan jawaban memori

kasasi pada tanggal 11 Mei 2011 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi.

Pada tanggal 7 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya Nomor: 573/K/Ag/2011 yang menyatakan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tertanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tertanggal 18 Agustus 2010.

Menurut penulis, Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya belum sesuai, karena jika Pemohon Kasasi sudah tidak menginginkan perkawinan dengan Termohon Kasasi dan tidak diperlukan adanya pembaharuan akad nikah, dengan adanya perkara perceraian pada pengadilan tingkat pertama yang sudah lebih dulu masuk sebelum permohonan pembatalan perkawinan diajukan, dan gugatan perceraian tersebut sudah diputus dengan putusan perceraian Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP tertanggal 15 Februari 2010 yang menjadi bukti dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan. Putusan tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah putus. Apabila putusnya perkawinan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi, dengan

adanya putusan tersebut seharusnya Pemohon Kasasi tidak perlu lagi mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Jika diperhatikan pada kedua perkara tersebut yaitu perceraian dan pembatalan perkawinan, masuknya permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 18 November 2009 dan masuknya perkara perceraian pada tanggal 15 September 2009¹⁴¹, menunjukkan bahwa perkara perceraian yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum terselesaikan, tetapi dalam perkara pembatalan perkawinan dapat diterima dan tetap berjalan proses persidangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama belum menerapkan hukum acara, karna adanya dua perkara yang masuk dengan para pihak yang sama, maka harus didahulukan perkara yang lebih dahulu masuk hingga selesai proses pemeriksaannya sampai dengan putusan dan untuk perkara yang lain harus ditunda atau setidaknya putusan N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tidak dapat diterima.¹⁴²

Selain itu menurut penulis, Pemohon Kasasi mempunyai tujuan tersendiri dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Karena, pada dasarnya perkara pembatalan perkawinan dan perceraian sama-sama menjadikan putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi

¹⁴¹ Salinan Putusan Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP. (Lihat lampiran)

¹⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Amri, SH., MH. selaku salah satu Hakim Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 20 Januari 2016.

dengan Termohon Kasasi. Hal ini yang menjadi pertanyaan besar dimungkinkannya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan karena akibat hukum dari pembatalan perkawinan dan perceraian yang berbeda. Berdasarkan analisis di atas, seharusnya Majelis Hakim dalam upaya hukum Kasasi lebih mengarah kepada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan berbagai pertimbangan hukumnya, yang mana menurut penulis putusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis Putusan Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila suatu perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu juga pada perkara pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada putusan Kasasi Nomor: 573/K/Ag/2011 tertanggal 7 Februari 2012. Adanya putusan Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2012, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2012 dan pada hari itu juga telah menyerahkan memori peninjauan kembali. Kemudian

permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali tersebut diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2012 dan telah pula menyerahkan jawaban memori peninjauan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Dengan berbagai pertimbangan hukum Hakim Agung, pada tanggal 21 Juli 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya Nomor 21/PK/Ag/2013 yang menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Dalam menganalisis hal ini, penulis kurang sependapat dengan dasar pertimbangan hukum Hakim Agung yang menyatakan bukti adanya novum sebagai alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali merupakan bukti yang bukan bersifat menentukan dan tidak terdapat kekeliruan hakim dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dari *judex factie* dan *judex juris*. Karena, upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa, memeriksa kembali perkara pada *judex factie* dan *judex juris*. Apakah pengadilan *judex factie* telah memeriksa perkara dengan benar berdasarkan bukti-bukti ataukah belum dan apakah pengadilan *judex juris* telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ataukah belum.

Pada poin pertama, pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah novum yang bukan bersifat menentukan. Bukti novum yang diajukan Pemohon yaitu berupa Akta Kelahiran Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Arman Jamaing dan Darwati. Dinilai dari keaslian akta tersebut sebagai novum dimana fotocopy Akta Kelahiran telah disesuaikan dengan aslinya yang ditandatangani oleh Lurah Jeppe'e dan diberi materai. Hal itu menunjukkan keaslian Akta Kelahiran tersebut, selain itu novum telah ada sebelum diajukannya permohonan pembatalan perkawinan pada tingkat pertama karena akta dibuat pada tahun 2003,¹⁴³ sedangkan permohonan pembatalan perkawinan diajukan pada tahun 2009.

Alasan dapat diterimanya permohonan Peninjauan Kembali yaitu ditemukannya surat bukti yang berkualitas dan bersifat menentukan seperti akta autentik atau akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Terkait dengan novum di atas, maka Akta Kelahiran tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh dan

¹⁴³ Fotocopy Bukti Novum yang berupa Akta Kelahiran. (Lihat lampiran)

dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga nilai dari pembuktian novum itu termasuk dalam pembuktian yang sempurna dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada novum tersebut bersifat mengikat.

Selain ditemukan surat-surat yang bersifat menentukan, ketentuan lain yaitu tenggang waktu ditemukannya novum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bahwa ketentuan tenggang waktu ditemukannya bukti surat sebagai novum untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu 180 hari dari tanggal ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan. Apabila tenggang waktu itu dilampaui, maka permohonan Peninjauan Kembali dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kembali pada putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil yang ditentukan. Logikanya, novum yang diajukan oleh Pemohon merupakan bersifat menentukan karena alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dihitung 180 hari sejak ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan

seperti akta autentik yang telah dibahas di atas. Apabila melebihi dari tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan Pemohon dijatuhi putusan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formil, bukan putusan ditolak karena permohonan yang diajukan tidak beralasan sebagaimana alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Poin kedua, dasar pertimbangan hukum Hakim Agung yang menyatakan tidak terdapat kekeliruan hakim dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dari *judex factie* dan *judex juris*. Kembali pada putusan Pengadilan Agama Bekasi, dalam jawaban eksepsi Termohon I (istri) untuk menguatkan jawabannya Termohon I mengajukan bukti berupa berkas putusan perceraian Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP, masuk pada tanggal 15 September 2009 dan diputus tanggal 15 Februari 2010. Menurut penulis disinilah letak kekeliruan dan kekhilafan hakim, seharusnya Hakim Agung memeriksa kembali proses pemeriksaan perkara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Sebagaimana pada analisis sebelumnya, bahwa masuknya dua perkara dengan para pihak berperkara yang sama, maka perkara yang terlebih dahulu masuk yang harus dilanjutkan proses pemeriksaannya hingga perkara tersebut dijatuhi putusannya, kemudian pada perkara yang lain ditunda

pemeriksaannya hingga perkara pertama yang masuk telah dijatuhkan putusannya oleh Majelis Hakim. Hal ini jelas adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim, yang mana Majelis Hakim tingkat pertama belum menerapkan hukum acara mengenai penundaan dua perkara dengan para pihak berperkara yang sama.

Selain itu, kekhilafan dan kekeliruan hakim yang tidak mempertimbangkan adanya bukti perceraian yang sudah diputus. Sehingga, dengan adanya bukti tersebut seharusnya pengadilan tingkat pertama tidak perlu melanjutkan proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon (suami), karena pada dasarnya perkawinan pemohon dengan termohon telah putus. Atau setidaknya bukti perceraian yang ada dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan menjadi pertimbangan hakim untuk menolak perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Analisis penulis berdasarkan pendapat Hakim Agung yang menyatakan, *“di Mahkamah Agung belum terdapat kesepakatan untuk membedakan alasan PK yang didasarkan pada kekhilafan hakim dengan alasan PK yang didasarkan pada kekeliruan nyata, dimana bisa saja dengan alasan kesalahan penerapan hukum, tidak dipertimbangkannya salah satu bukti atau adanya pertimbangan yang kurang kemudian*

diajukan sebagai bagian dari alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata”.¹⁴⁴

Dalam kasus perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat formil. Sehingga novum yang ada sudah cukup sebagai pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, karena secara formil novum sudah membuktikan bahwa Arman Jamaing merupakan wali nikah yang sah. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli hukum yang mengatakan:

“Peran hakim terbatas pada kebenaran dalam bentuk formil yang diatur oleh hukum. Hakim tidak dituntut mencari dan menemukan kebenaran materiil berdasarkan hati nurani, namun pemahaman kebenaran formil haruslah ditafsirkan sebagai penjabaran fakta dan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan berlangsung”.¹⁴⁵

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Perkara Nomor 21/PK/Ag/2103

Sesuai dengan putusan Peninjauan Kembali, bahwa dalam amarnya menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka keputusan yang diterapkan tetap pada putusan Kasasi Nomor: 573/K/Ag/2011

¹⁴⁴ Witanto, *Penafsiran ...*, h. 58-59.

¹⁴⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2012, h. 147.

tanggal 7 Februari 2012, yang amarnya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 25 Januari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 18 Agustus 2010.

Demikian pula dalam putusan tingkat pertama, yang amarnya menyatakan bahwa membatalkan perkawinan antara Pemohon (suami) dengan Termohon I (isteri) dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 712.02/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada dasarnya, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan atau perkawinan tidak ada sejak awal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan dilaksanakan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdapat perbedaan antara Undang – Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan, dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Dalam literatur fiqih, Imam madzhab berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Menurut ulama Hanafiah, hukum pernikahan yang tidak sah adalah bahwa pernikahan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak dihalalkan menggauli si perempuan, tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah, ketaatan si perempuan, serta mereka tidak dapat saling mewarisi.

Diwajibkan tidak terjadi hubungan intim di antara mereka berdua. Jika hal ini terjadi, hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa dan tidak ada masa 'iddah setelahnya.¹⁴⁶

Menurut ulama Malikiah, akibat hukum dari pernikahan yang rusak dan tidak sah, yaitu jika belum terjadi hubungan intim maka tidak ada hak apa pun bagi si perempuan. Hal ini sesuai kaidah fiqh:

كُلُّ نِكَاحٍ فَسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى
فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلِفًا فِيهِ، كَانَ الْفَسَادُ لِعَقْدِهِ أَوْ لِمَصَادَقَةِ أَوْلَاهُمَا.

Artinya: *“Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan adanya maupun karena maharnya, atau karena keduanya”*.

Sedangkan jika sudah terjadi hubungan intim, maka akibat hukumnya: *Pertama*, wajib membayar mahar karena telah *dukhol*. *Kedua* tetapnya garis keturunan anak kepada ayahnya. *Ketiga*, tetapnya hak saling mewarisi antara lelaki dan perempuan. *Keempat*, tetapnya hubungan kemahraman *mushahahar*, sebab telah terjadi *wathi*’ atau sekedar pendahuluan hubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. *Kelima*, seorang wanita diwajibkan ber-‘iddah jika

¹⁴⁶ Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, h. 108-109.

suaminya telah berhubungan intim dengannya. Masa iddah itu dimulai sejak mereka *difasakh*.¹⁴⁷

Ulama Syafi'iyah menilai hukum dari pernikahan yang batal yaitu tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *mushaharah*, penetapan nasab dan *'iddah*. Akan tetapi, apabila sudah berhubungan intim dalam perkawinan tanpa wali maka diwajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar mitsil, sekalipun perkawinan itu sendiri batal.¹⁴⁸ Dengan dasar hadits yang digunakan:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ حُرَيْجٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ
إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ
اسْتَجَرُوا، فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ." (رواه
الترمذي)¹⁴⁹

Artinya: Telah menceritakan Ibnu Abi Umar. Memberitahukan
Sufyan bin 'Uyaynah dari Ibni Huraij dari Sulaiman,

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 109-112.

¹⁴⁸ Zuhaili, *Fiqh Imam ...*, h. 460.

¹⁴⁹ al-Mubarakafuri, *Tuhfat ...*, h. 192.

dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan mana saja yang bernikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika dia telah disetubuhi, maka dia berhak mendapat mas kawin dengan sebab si laki-laki itu, telah menghalalkan kehormatannya. Dan jika mereka berbeda-beda pendapat (berselisih), maka sultan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali". (HR. Tirmidzi)¹⁵⁰

Akibat-akibat nikah *fasid* tersebut ialah¹⁵¹:

1. Wajib menyerahkan mahar bila telah melakukan *dukhul*;
2. Tetapnya nasab anak kepada bapaknya dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan anak dan tidak menyusahkannya;
3. Tetapnya mahram dengan alasan *mushaharah* karena *dukhul*;
4. Tetapnya iddah bila telah *dukhul*;

Dengan ditolaknya putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013 yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana alasan Pemohon bahwa adanya kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan putusan Kasasi, yang mana Majelis Hakim tidak mengacu pada perkara perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang telah diputus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

¹⁵⁰ ash-Shiddieqy, *Koleksi ...*, h. 25.

¹⁵¹ Abdil Baril Basith, "Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat)", t.tp: t.p, t.th, h. 20.

pada tanggal 15 Februari 2010 perkara Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP. Walaupun dengan adanya bukti perceraian tersebut, namun karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak maka tetap keadaan hukum yang digunakan adalah putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon karena pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, bukan karena perceraian. Maka akibat hukumnya pun adalah sebagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan, bukan akibat hukum dari perceraian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut penulis akibat hukum dari putusan Nomor 21/PK/Ag/2013 adalah menjadikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon batal karena wali nikah yang tidak sah. Karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memiliki keturunan (anak), maka akibat hukumnya hanya terhadap istri yaitu mengenai mahar dan *'iddah*.

Mengenai mahar yang diminta kembali sebagaimana yang tercantum dalam petitum Pemohon, menurut Majelis Hakim tidak dapat ditarik kembali, mengingat mereka yang telah hidup bersama selama \pm 9 (sembilan) bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebagaimana hal di atas, hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, bahwa calon mempelai pria wajib membayar

mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Begitu pula pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu Juz 7 yang artinya, “...*Apabila dalam perkawinan yang cacat hukum sudah terjadi hubungan kelamin meski hukumnya haram, merupakan perbuatan maksiat dan harus dibatalkan, maka harus diberlakukan sebagian ketentuan-ketentuan hukumnya, yakni bagi wanita dalam perkawinan yang demikian harus mendapatkan bagian minimal dari mahar yang diucapkan atau dari mahar mitsil...*”.¹⁵²

Dengan demikian, mahar perkawinan tidak dapat diminta kembali meskipun dalam perkawinan Pemohon (isteri) dengan Termohon (suami) terdapat cacat hukum sehingga perkawinannya batal, mengingat pendapat Imam madzhab karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*).

Selain mahar yang tidak dapat ditarik kembali sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, adanya *'iddah* terhadap istri juga sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena telah *dukhul*. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan:

¹⁵² Salinan Putusan Nomor: 1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. (Lihat lampiran)

كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسَخٍ بَعْدَ الْوَطْءِ تُوجِبُ الْعِدَّةَ

Artinya: “Setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah campur, maka wajib ‘iddah”.¹⁵³

Begitu juga pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa apabila wanita yang difasakh tidak dalam keadaan hamil dan dia termasuk wanita yang subur maka masa ‘iddahnya yaitu tiga kali suci¹⁵⁴, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ....

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’...”.¹⁵⁵

¹⁵³ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Edisi 1, Jakarta: Kencana, Cet. ke-2, 2007, h. 125.

¹⁵⁴ Zuhaili, *Fiqh Imam ...*, h. 5.

¹⁵⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an ...*, h. 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor: 21/PK/Ag/2013 tentang pembatalan perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak sah, penulis dapat menyimpulkan:

1. Putusan Nomor: 21/PK/Ag/2013 yang menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan hukum, novum yang dijadikan bukti bukan bersifat menentukan dan tidak terdapat kekeliruan hakim dan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dari *judex factie* dan *judex juris*. Berdasarkan analisis, penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum yang menyatakan novum bukan bersifat menentukan. Novum yang diajukan berupa Akta Kelahiran Pemohon dan novum telah ada sebelum diajukannya permohonan pembatalan perkawinan. Akta Kelahiran tersebut merupakan akta autentik. Bukti yang bersifat menentukan adalah bukti yang berkualitas seperti akta autentik dan diajukannya novum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 180 hari sejak ditemukannya bukti surat. Menurut penulis novum yang diajukan dalam perkara pembatalan perkawinan ini merupakan novum yang bersifat

menentukan. Selain itu, pertimbangan hukum yang menyatakan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Sebagai upaya hukum luar biasa, maka upaya hukum Peninjauan Kembali harus memeriksa kembali perkara pada *judex factie* dan *judex juris*. Mengingat pada bukti putusan perceraian Nomor: 646/Pdt.G/2009/PA.JP tertanggal 15 Februari 2010, yang diajukan oleh Termohon I (isteri) pada pengadilan tingkat pertama, disinilah menurut penulis letak kekeliruan dan kekhilafan hakim. Karena, masuknya permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 18 November 2009 dan masuknya perkara perceraian pada tanggal 15 September 2009, menunjukkan bahwa perkara perceraian yang masih dalam proses pemeriksaan, tetapi dalam perkara pembatalan perkawinan dapat diterima dan tetap berjalan proses persidangannya. Seharusnya perkara pembatalan perkawinan ditunda, atau setidaknya Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti tersebut sebagai pertimbangan hukum hakim.

2. Putusan Nomor 21/PK/Ag/2013 adalah menjadikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon batal karena wali nikah yang tidak sah. Karena dalam

perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak memiliki keturunan (anak), maka akibat hukumnya hanya terhadap istri yaitu mengenai mahar dan *'iddah*. Mengenai mahar yang diminta kembali oleh suami, menurut penulis mahar perkawinan tidak dapat ditarik kembali meskipun dalam perkawinan Pemohon (isteri) dengan Termohon (suami) terdapat cacat hukum sehingga perkawinannya batal, mengingat pendapat Imam madzhab karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Selain itu, adanya *'iddah* terhadap istri juga sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena telah *dukhul*. Hal ini sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan:

كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسَخٍ بَعْدَ الْوِطْءِ تُوجِبُ الْعِدَّةَ

Artinya: *“Setiap perceraian karena talak atau fasakh sesudah campur, maka wajib ‘iddah”*.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada:

1. Masyarakat. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan menurut Islam dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apabila

dalam perkawinan tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka dapat dimintakan pembatalan perkawinan kepada pihak yang berwenang yaitu pengadilan. Maka dari masalah di atas dapat dijadikan pembelajaran untuk masyarakat yang hendak melakukan perkawinan dengan pasangannya, yaitu harus benar-benar mengetahui keluarga nasab dari pasangan.

2. Pegawai Pencatat Nikah. Sebelum melakukan akad perkawinan, penghulu harus lebih teliti terhadap data kehendak nikah dengan mengetahui kebenaran dari data tersebut, dalam rangka mengantisipasi pemalsuan identitas yang tercatat dalam data kehendak nikah.
3. Hakim. Dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara hakim harus memperhatikan hukum acara yang berlaku di peradilan agama, sehingga putusan yang dihasilkan mampu memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Apabila hakim memutuskan suatu perkara tanpa memperhatikan hukum acara, keputusannya dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku.

C. Penutup

Maha suci Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dan penulisan sebagai tugas akhir

perkuliahan. Semoga karya tangan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan hukum perdata di Indonesia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam kandungan isi maupun bentuk penulisan yang disampaikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Kata maaf penulis sampaikan atas ketidaksempurnaan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para pembaca yang bersedia meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini. Semoga barokah. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Adiwinata, S. *Istilah Hukum: Latin-Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 4, Terj. Rahmatullah et al., Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Matan al-Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Ahmad Tirmidzi, et al., Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Mubarakafuri, Al-Imam Hafidz Abi Al-Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfat al-Ahwadzi*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arto, A. Mukti. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- , *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.
- Aryani, Annisa Lutfi. *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg)*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2012.

Basith, Abdil Baril. *Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat)*, t.tp: t.p, t.th.

Budiman, Achmad Arief. *Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, UIN Walisongo Semarang: Jurnal *al-Ahkam*, Volume 24 Nomor 1, Edisi April 2014.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah Per-kata*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.

-----, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: tp. 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Edisi 1, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

-----, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

-----, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.

Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

-----, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kansil, C.S.T. *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Lien Sebesty, Iin Zefanya. *Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks)*, Skripsi, Makassar: Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. ke-7, Jakarta: Kencana, 2011.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., et al., Cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nuh, Nuhrison M. et. al. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.

Nur'aini, Shofi. *Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg.)*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

-----, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*, Terj. Moh. Abidun, et al., Cet. ke-2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Simorangkir, et al. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1942.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1980.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan UUPA dan UUP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Edisi 1, Cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2010.
- Ulfah, Rina Rif'atin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan*, Skripsi, Semarang: Studi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Witanto, Djoni. *Penafsiran Pasal 67 Huruf F UU Mahkamah Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali*, Laporan Penelitian: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

-----, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jakarta: Gema Insani, 2011.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 dengan narasumber dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama Bekasi yaitu Bapak Amri, SH., MH.

Bilkis : *Langsung saja ya Pak, ini kan perkara pembatalan perkawinan, apa saja sih Pak syarat yang harus dipersiapkan dalam mengajukan permohonan perkara pembatalan perkawinan?*

Hakim : *Ya tentu kalau ada pihak-pihak yang ingin membatalkan perkawinan, itu yang perlu dilihatnya, apakah perkawinan yang dilakukan seseorang itu sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam, karena bagaimana pun yang menjadi wewenang Pengadilan Agama itu adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, nah itu yang pertama syarat dan rukunnya yang ada di fiqih, fiqih itu ya kalau bagi kita, eee undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu kalau sudah dia menjadi aturan yang berlaku bagi kita, udah menjadi hukum positif, ya fiqih juga kan begitu, aaaa... jadi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fiqih itu, yang menyangkut dengan perkawinan. Kalau perkawinan itu ada yang cacat, atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan secara hukum Islam itu, aa.. itulah yang bisa diajukan ee.. untuk dibatalkan.*

Bilkis : *Iya Pak. Kemudian dalam acara ini Pak, dalam acara permohonan pembatalan perkawinan, itu sebenarnya sama gak sih Pak proses beracaranya dengan perkara gugatan?*

Hakim : *Sama. Jadi pembatalan perkawinan itu juga eee.. nanti digugat, eee.. nanti ada katakanlah mislanya, eee.. seorang istri mau membatalkan perkawinan suaminya dengan perempuan lain. Aaa.. begitu kan, nah nanti dia membuat gugatan, permohonan pembatalan tapi dalam bentuk gugatan, suaminya itu sebagai tergugat sekaligus.*

Bilkis : *Lalu dalam usaha adanya upaya mediasi itu Pak, ada juga Pak?*

Hakim : *Aaa... itu kalau dia tidak bukan untuk berdamai, tidak ada mediasi. Eee.. jadi langsung kita periksa perkara. Eee.. kalau permohonan pembatalan masa dimediasi, supaya di.. disahkan kan gitu, tidak. Aa.. jadi langsung kita periksa, hanya paling-paling kita sarankan kala ada perbaikan dari gugatan, ada yang kurang, ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dikurangi aa.. itu silahkan. Tapi kalau gak cukup katanya begitu dengan gugatan itu permohonannya itu, aa... maka kita lanjutkan tanpa perlu dimediasi lagi, karena dia bukan sengketa.*

Bilkis : *Aaa.. jadi yang didalamnya terdapat sengketa ya Pak?*

Hakim : *Itu yang kita mediasi, kalau penetapan ahli waris katanya kan misalnya, permohonan penetapan ahli waris, permohonan*

pengangkatan anak katanya gitu kan, itu kan gak sengketa, aa... itu tidak ada mediasi.

Bilkis : *Ooh iya Pak. Biasanya kan dalam bentuk permohonan itu kan Pak, misalnya permohonan dispensasi nikah ya Pak. Itu kan aa.. ada upaya hukumnya gak Pak , apa langsung Kasasi apa Banding dulu, apa gimana Pak?*

Hakim : *Iya Kasasi. Kalau dispensasi nikah itu kan dia umurnya masih di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang. Katakanlah perempuan yang umurnya 14 tahun, misalnya kan itu kan belum boleh dinikahkan. Aa.. tapi karena sesuatu alasan dia minta menikah.. aa.. nanti diajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.*

Bilkis : *Lalu kalau misalnya perkara ini Pak, permohonan pembatalan perkawinan ini, tetap ada upaya hukum?*

Hakim : *Ada, iya tetap. Eee.. misalnya kan begini, eee... ada seseorang menikah ya, dua orang maksudnya menikah, ternyata disitu walinya tidak sah.. aa.. katakanlah syarat wali itu kan ada hubungan, hubungan darah ya kan hubungan nasab, mungkin orang lain sebagai wali ini. Tentu ada wali yang sah tapi bukan itu yang dipakai. Aaa.. itu bisa dibatalkan. Karena memang kan aa.. rukun nikah itu kan ada ee.. calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada walinya, ada dua orang saksi, ada ijab kabulnya kan begitu. Aa.. kalau yang empat ini,*

lima itu calon suami, calon istri, lima jadinya, kalau yang lima itu tidak ada berarti tidak sah..., aaa... begitu. gak ada wali gak sah, gak ada ijab kabul gak sah, gak ada si laki misalnya perempuan aja, gak sah juga aaa. gitu. Nah, kembali kepada pertama wali eee.. ada, tapi kan syarat-syarat wali ada, aaa. wali itu harus dia ada hubungan nasab, aa.. itu yang pertama. Yang pertama itu Ayah, kalau Ayahnya ada, ang lain tidak boleh menikahkan, kan gitu, ada Ayah tidak boleh orang lain menikahkan, ketika Ayah tidak ada baru ke yang kedua saudara kandung, itu dulu. Nah, ada saudara kandung tapi misalnya dinikahkan oleh orang lain, kan gak memenuhi syarat sebagai wali. Aaa... ya itu bisa dibatalkan. Aa.. begitu, itu kan ada urutan ya, kira-kira begitulah gambrannya yang pertama Ayah, Saudara kandung, kemudian nanti Paman, aa.. anak dari Paman, dan seterusnya lah gitu kan, Kakeknya misalnya kan, tapi kalau urutan ini tidak eee.. tidak benar, ini bisa dibatalkan. Nah, di Indonesia ini, lembaga yang bisa membatalkannya itu, itulah Pengadilan Agama.

Bilkis : *Berarti Pak, kalau pembatalan perkawinan itu, pas masuk ke Pengadilan Agamanya itu dalam bentuk permohonan apa gugatan Pak?*

Hakim : *Permohonan yang dia itu berbentuk gugatan. Tetap permohonan tapi ada dia lawan.*

Bilkis : *Ooo... berarti dalam kop surat itu....*

Hakim : *Permohonan, bentukannya gugatan. Ada dia yang itu tergugat, termohon istilahnya. Sekarang arah hukum kita itu, yang diajukan ke Pengadilan itu, harus dia itu yang bermasalah. Kira-kira rumus dan logikanya kan begini, Pengadilan tempat mencari keadilan, tentu ada ketidakadilan sebelumnya itu, aa... ada ketidakadilan yang timbul di masyarakat, aaa.. dibawahlah ke Pengadilan, diminta keadilan. Nah, ada sengketa disana. Aaa... dalam hal ini antara wali, ini kan yang menjadi masalah kan wali nih, antara wali dengan, apakah dengan wali yang menikahkan ataukah dengan yang ada berkepentingan disini. Nah ini nih, kira-kira itulah kira-kira bayangannya, ada sengketa, ada masalah, ada gugatan, ada yang tergugatnya gitu. Hanya kira-kira yang berbentuk permohonan pembatalan gitu.. kan yang sudah ada mau dibatalkan, aa.. itu bentuknya permohonan tapi ada lawan. Sama dengan wali 'adhol, wali yang gak mau menikahkan anaknya, itu bentuknya permohonan, tapi wali yang gak mau menikahkan itu diangkat sebagai termohonnya, aa... gitu.. yang dilawan gitu..*

Bilkis : *Terus Pak, apa namanya ee... kan permohonan pembatalan ini, salah satunya ini rukun nikahnya kan gak sah yaa, eh salah satu rukunnya itu tidak ada ya Pak. Lalu, di Pengadilan Agama biasanya itu, kalau misalnya ada kayak cacat dari suami kalau gak istrinya itu, biasanya ada gak Pak, perkara-perkara yang seperti itu Pak?*

Hakim : *Cacat yang gimana ini maksudnya? Cacat....*

Bilkis : *Dalam arti misalnya suaminya maaf Pak, impoten.*

Hakim : *Impoten? E'e.. itu nanti alasan perceraian, bisa itu. Sama kalau dalam kitab-kitab fiqih itu, eee... Yang sering digambarkan itu kan perempuan, yang ada cacat yaa, sehingga tidak bisa menjalani hubungan sebagai suami istri, bisa menjadi alasan bagi si suami menceraikan istrinya, kan begitu. Sama juga sebaliknya, kalau laki-laki ya tidak mampu melaksanakan ya bisa.*

Bilkis : *Tapi kalau menjadi alasan pembatalan perkawinan ini bisa Pak?*

Hakim : *Ini kan begini, berbeda antara perceraian dengan pembatalan perkawinan. Kalau pembatalan perkawinan itu orang lain yang membatalkan perkawinan orang lain. Aaa.. kalau perceraian, yang bersangkutan itu ingin berpisah dengan pasangannya. Aaa... kalau pembatalan, orang lain yang membatalkan. Aaa... katakanlah, saumi istri sah, eh tau-tau si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Aaa.. gitu kan jadi si suami yang pertamanya ini membatalkan perkawinan si perempuan ini dengan laki-laki lain itu. Aa.. jadi orang lain yang membatalkan. Tapi kalau perceraian, mereka berdua ini yang mengajukan ke Pengadilan minta bercerai. Walaupun produknya nanti cerai juga, gitu.. kan. Tapi yang cerai itu antara si B dengan si C ini, nah itu pembatalan begitu kira-kira.*

Bilkis : *Ohh, jadi pembatalan itu, jadi gak memenuhi syarat rukun ya Pak?*

Hakim : *Syarat rukun salah satu, aaa.. untuk dibatalkan.*

Bilkis : *Berarti Pak kalau pembatalan itu, apakah boleh Pak dari pihak suami atau istri yang mengajukan itu boleh Pak?*

Hakim : *Semua yang berkepentingan boleh. Yang berkepentingan itu ya suami istri pasti. Ini kan statusnya istri dia, dinikahi oleh orang lain. Aaa.. atau misalnya ini suami dia, dinikahi oleh perempuan lain, kan. Aaa.. ini dibatalkan. Bahkan kalau misalnya tanpa ijin Pengadilan dia berpoligami, bisa dibatalkan. Sering itu, tau-tau dia menikah lagi dengan orang lain. Oleh si istri ini dia bukan minta bercerai dengan suaminya ini, tapi batalkan perkawinan suami saya ini dengan perempuan yang itu tuh, nah gitu.. nah itu salah satu isyarat.*

Bilkis : *Biasanya itu apa Pak, proses pembatalan perkawinan itu memakan waktunya itu berapa, umumnya itu di Pengadilan?*

Hakim : *Aaa.. Aturan kan tetap Undang – Undang Hukum Acara Perdata HIR RBG. Jadi prosesnya membuat gugatan dulu atau permohonan dulu, kemudian nanti didaftar, kemudian dipanggil panggilan, persidangan pertama, nanti ya kalau perlu mediasi ya mediasi, kalau enggak ya enggak, kemudian nanti ada jawab menjawab juga, jawaban, replik, duplik, pembuktian dari kedua pihak*

kalau memang itu ternyata berlawanan ya kan.. kemudian kesimpulan akhir, baca putusan. Sama. Karena memang itu sekarang aturan hukum acaranya, HIR RBG ya. Bagi kita yang di pulau Jawa ini HIR, kalau yang di luar Jawa RBG.

Bilkis : *Sebenarnya pas kita baca putusan itu ya Pak, itu putusan pembatalan perkawinan itu sebelumnya sudah ada putusan perceraian atas nama itu sendiri Pak.*

Hakim : *Itulah, Saya belum baca kasus ini , ya kan. Andaikan sudah baca bisa saya jelaskan ini. Kira-kira gambarannya yang terbaca gimana?*

Bilkis : *Gambarannya begini Pak. Ini kan putus tahun 2010 ya Pak. Lah terus sebelumnya diputus, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat udah ada putusan perceraian atas nama itu Pak. Suami istri sudah bercerai. Tapi pihak suami mengajukan pembatalan perkawinan disini.*

Hakim : *Ooh berarti si suami membatalkan perkawinan dia sendiri disini, sementara di Jakarta Pusat istrinya mengajukan gugat cerai dengan suaminya ini juga?*

Bilkis : *Iya Pak.*

Hakim : *Ooh. Begitu ya kasusnya.*

Bilkis : *Makanya ngerasa kok agak aneh gitu Pak.*

Hakim : *Ooh iya iya ya.. Gak lazim itu, biasanya kalau terjadi kasus seperti ini, sering kasus-kasus itu memang begitu, kita pending dulu satu, nah kita tunda dulu. Seperti kemarin ini.. yang perkara kawan saya, satu diajukan disini oleh suaminya cerai juga terhadap istrinya, istrinya itu mengajukan di Bali, tapi sama-sama cerai itu. Nah kalau memang ketahuan seperti itu tetap kita pending dulu, mana yang belakangan masuk kita tunda. Gak ada untungnya kita sama-sama memeriksa seperti itu, biar selesai dulu satu-satu.*

Bilkis : *Berarti gak bisa langsung dua-duanya ya Pak?*

Hakim : *Aaa.. kalau tidak ketahuan bisa-bisa saja. Tapi kalau ketahuan menurut aturannya harus dipending dulu satu. Ketika biasanya begitu nanti sudah diputus di Bali misalnya, langsung saja kita N.O. (niet ontvankelijk verklaard) disini. N.O. terus kenapa? Gak mungkin kita menceraikan orang yang sudah bercerai.*

Bilkis : *Padahal sudah ada keputusan cerai...*

Hakim : *Ini mana duluan putusan sana ama sini?*

Bilkis : *Di Jakarta Pusat duluan Pak.*

Hakim : *Udah diceraikan disana, disini tetap melanjutkan?*

Bilkis : *Makanya ini sampai ke PK ini Pak.*

Hakim : *Ha aa... Iya iya... Jadi, saya memang gak tau kenapa seperti itu waktu itu ya. Kalau yang kasusnya itu diajukan di tempat lain, diajukan disini biasa. Nah tapi begitu kita tau, pasti kita cabut satu, misalnya kita sarankan, kalau gak mau kita tunda dulu, aaa.. ngapain kita cari-cari capek. Haha.. gitu kan, tunggu dulu yang mana dulu yang dimasukkan? Jakarta deh. Selesaikan dulu disana, sudah selesai disana nanti baru kemari. Aaa.. kalau ternyata disana misalkan ditolak cerainya, kan belum bercerai tuh? Kita lanjut disini. Ya mungkin saja setelah dari sana, emm suasana rumah tangga ini kan udah berubah, kalau misal disana ditolak cerainya, mereka dianggap rukun, ternyata ada perubahan udah gak rukun lagi, maka kita periksa disini. Tapi ya memang, apa waktu itu tidak diketahui oleh hakim-hakim disini, mereka diam-diam saja itu kan, bisa bisa saja kan, atau memang dia gak tau masalah hukum, dia anggap ini ya memang inilah nasib kami, berperkara disini berperkara disana kan bisa saja kan. Hakim kan gak tau sampai ke sana.*

Bilkis : *Tapi Pak di Jakarta Pusat perceraian sudah diputus, nah disini masih dilanjutkan pembatalan perkawinan dan dikabulkan juga permohonan pembatalannya itu Pak.*

Hakim : *Memang ini kehidupan di Kota besar kan.. beda dengan di kampung-kampung. Konsekuensinya kan berbeda antara pembatalan dengan perceraian, naah.. dampaknya terhadap harta, terhadap anak. Ini nih, kadang-kadang orang disitu, kalau perceraian*

menguntungkan dia dipilihnya jalur perceraian, kalau pembatalan menguntungkan dia jalur pembatalan yang dipilih. Nah, ini nih apa ini dibelakang itu.

Bilkis : *Memang kasusnya waktu itu mahar pernikahannya banyak sekali Pak. Kemungkinan laki-laki kecewa terus pengen pembatalan biar maharnya kembali.*

Hakim : *Ah mungkin itu, pembatalan memang dikembalikan mahar, karena dianggap tidak pernah ada perkawinan. Bisa itu kalau itu. Itulah yang saya bilang kalau di Kota besar ada kepentingan-kepentingan kadang-kadang. Jadi memang kita harus teliti sebagai hakim itu, walaupun memang pembatalan, memang harus pembatalan. Katakanlah tadi misalnya itu wali nikah yang tidak sah. Kenapa dulu menikah memilih wali ini?*

Bilkis : *Kalau siapa tahu dia berbohong bagaimana?*

Hakim : *Ya hakim kan gak tau, ya salah berarti. Kalau memang dia berbohong, main-main misalnya, ya tetap kita batalkan memang itu tidak sah perkawinan itu. Kalau ternyata memang tidak sah, ya kita batalkan. Ya masalah pernikahan ada yang rugi ya memang itu resiko memainkan hukum. Mahar itu memang sudah tidak bisa dikembalikan lagi kalau memang mereka sudah hubungan badan.*

Bilkis : *Ya Pak. Menurut saya itu sudah cukup.*



PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS I B

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.10, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Telp/Fax. 021-8841880/8849225 Homepage: www.pa-bekasi.go.id

e-mail: pa.bekasi_ptabdg@yahoo.co.id

Kode POS 17141

Nomor : W.10-A19/ **2133** /HK.05/III/2016 Bekasi, 22 Maret 2016
Lampiran : 1 Ekslembar
Perihal : Keterangan telah melakukan penelitian

Saya A. Djudairi Rawiyan, SH. Panitera Pengadilan Agama Bekasi,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khumairoh Bilkis
NIM : 122111019
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyyah
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Benar telah melakukan penelitian terhadap Putusan Nomor:
1769/Pdt.G/2009/PA.Bks. pada Pengadilan Agama Bekasi pada
tanggal, 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya;

Panitera
Pengadilan Agama Bekasi,

A. Djudairi Rawiyan, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Agama Bekasi (Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo
3. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Amri, SH.MH.

Jabatan : Hakim PA Bekasi

Menyatakan bahwa saudara Khumairoh Bilkis, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 Januari 2016



(Drs. Amri, SH.MH.)



PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Jalan Rawasari Selatan No. 51, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih
Telp. 021-42802193, 42802210, 42802315 Fax. 021-42802307 Website: www.pa-jakartapusat.go.id
JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9.A1/2382 /HK.05/III/2016

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan surat **Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo** tanggal 16 Maret 2016 Nomor: Un.10.1/D1/TL.00/451/2016, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Khumairoh Bilkis
NIM : 122111019

Telah melakukan , penelitian, atau permintaan data. Pada tanggal 23 Maret 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta telah menerima data/bahan-bahan yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Mei 2016
Wakil Panitera

Hj. Ghizar Fau'ah, SH., MH.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Khumairoh Bilkis
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Mei 1994
Alamat : Jalan Kelapa Dua, RT 010/ RW 003
Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara

Pendidikan :

1. SDN 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara lulus pada tahun 2006
2. MTs Darul Amanah Kabunan Ngadiwarno Sukorejo Kendal lulus pada tahun 2009
3. MA Al-Hidayah Kembangan Utara Jakarta Barat lulus pada tahun 2012
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Masuk pada tahun 2012 (Semester VIII)

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.